

2026

Laporan Kinerja

**BIRO KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK**

SEMESTER I 2026

-  @KEMENKESRI
-  @KEMENKES_RI
-  KEMKES.GO.ID
-  KEMENTERIAN KESEHATAN RI
-  KEMENTERIAN KESEHATAN RI
-  SIARAN RADIO KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan wujud implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dengan tujuan untuk mencerminkan komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama periode ini. Hal tersebut menjadi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam memahami proses dan capaian yang telah diraih serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penciptaan inovasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

Jakarta, Juni 2026
Kepala Biro Komunikasi dan
Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM
NIP. 197712122002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan Tingkat Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berada di bawah tanggung jawab Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja mendukung Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan nomenklatur tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan indikator kinerja yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Berikut adalah matriks yang menjabarkan target dan realisasi indikator kinerja di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2026 berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029:

SASARAN	INDIKATOR	SEMESTER I TA 2026	
		TARGET	REALISASI
Berdasarkan Rencana Strategis			
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	0
	Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	0
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	70	0

Namun, sesuai dengan arahan Sekretaris Jenderal, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 mengalami perubahan sehubungan dengan penyesuaian terhadap realisasi pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	SEMESTER I TA 2026	
		TARGET	REALISASI
Berdasarkan Rencana Strategis			
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	0
	Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	0
	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	70	41

Di sisi lain, peningkatan kualitas kinerja unit kerja dapat dilihat dari berbagai apresiasi yang diterima dalam bidang komunikasi dan informasi publik sepanjang tahun 2026 diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penghargaan High Impact Achievement Award

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meraih penghargaan *High Impact Achievement* 2025 dari Snack Video pada ajang Snack Video Gala yang diselenggarakan pada 9 Januari 2026, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dampak publikasi informasi kesehatan melalui platform digital.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I: PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	7
C. Struktur Organisasi.....	7
D. Sistematika Laporan.....	13
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Kinerja.....	15
B. Perjanjian Kinerja 2025.....	22
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja (3 Tahun Terakhir).....	27
1. Definisi Operasional Indikator.....	28
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Indikator.....	39
B. Analisis Capaian Kinerja.....	112
1. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target.....	112
2. Permasalahan.....	113
3. Pemecahan Masalah.....	113
4. Rencana Tindak Lanjut.....	114
C. Inovasi Kinerja.....	114
D. Sumber Daya/Realisasi Anggaran.....	115
1. Sumber Daya Manusia.....	115
2. Sumber Daya Anggaran.....	122
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	124
E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	130
BAB IV: KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Tindak Lanjut.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah menjadi elemen krusial dalam meraih tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang terus digalakkan di berbagai sektor pemerintahan. Sistem ini mengedepankan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-based management*) yang menekankan pada hasil yang dapat diukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan sistem ini tidak hanya berguna untuk pengukuran kinerja tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pendekatan ini mengharuskan instansi untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang nantinya akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi aspek efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Di era digital dan keterbukaan informasi ini, kebutuhan akan transparansi kinerja sangat mendesak. Masyarakat berekspektasi agar setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Masyarakat menginginkan adanya bukti nyata mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara serta dampak positif yang dihasilkan dari setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Tanpa transparansi, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan akan terus berkembang, sehingga dapat berimbas pada penurunan partisipasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, telah dikembangkan media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, sasaran prioritas nasional, serta fokus pada penguatan Transformasi Kesehatan yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Dalam Rencana Strategis baru, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki satu Indikator Kinerja Program (IKP) yang mendukung transformasi tersebut yaitu “Indikator Kinerja Pelanggan Kementerian Kesehatan” dan dua Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: (1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal; dan (2) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur

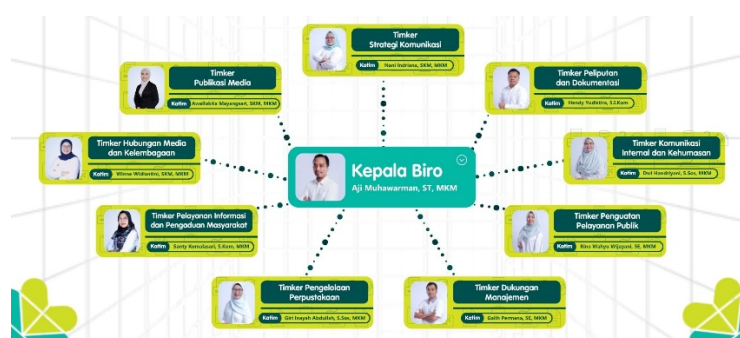
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memedomani peraturan tersebut,

Kementerian Kesehatan selanjutnya melakukan penataan atau penyesuaian nomenklatur organisasi, tugas, dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada pasal 25 disebutkan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi: a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, komunikasi risiko dan indeks kepuasan masyarakat terhadap berita dan publikasi kesehatan; b) pengelolaan publikasi di media konvensional dan digital; c) pelaksanaan liputan dan dokumentasi program dan kebijakan kesehatan; d) pengelolaan layanan informasi, keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat; e) koordinasi penguatan pelayanan publik dan kepatuhan standar perilaku interaksi layanan publik; f) pengelolaan komunikasi internal dan eksternal serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah; g) pengelolaan perpustakaan; dan h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan i) pelaksanaan urusan administrasi Biro. Peraturan ini juga mengatur mengenai Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari: a) Kepala Unit Kerja; b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

C. Struktur Organisasi

Merujuk pada peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan rentang kendali dalam operasional pelaksanaan kegiatan, maka dibentuklah tim kerja dalam setiap unit kerja. Setiap tim kerja dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan untuk jumlah anggota tidak ada pembatasan. Tim kerja yang dibentuk mempunyai tugas yaitu: 1) Menyusun perencanaan tim kerja; 2) Melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja; 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim; 4) Menyusun laporan kegiatan tim; dan 5) Melakukan koordinasi antar tim kerja dalam pekerjaan insidentil/penugasan.

**Gambar 1.1: Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Tahun 2026**



Di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik ditetapkan 9 (sembilan) Tim Kerja dengan lingkup tugas sebagai berikut:

1. TIM KERJA STRATEGI KOMUNIKASI

LINGKUP TUGAS

Penyusunan strategi komunikasi kebijakan/program kesehatan, pengelolaan isu publik dengan melakukan media *monitoring* baik media massa maupun media sosial secara berkala, *agenda setting*, penguatan kapasitas komunikasi risiko pada krisis kesehatan, dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi Kementerian Kesehatan.

2. TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI

LINGKUP TUGAS

Peliputan dan dokumentasi bagi Pimpinan Kemenkes (Menteri, Wamen, Sekjen dan DWP/SERUNI), produksi video dan naskah *taping* bagi pimpinan Kemenkes, produksi video kebijakan dan program kesehatan, membuat konten infografis *vcard/greeting* bagi Pimpinan Kemenkes, sosialisasi kegiatan Kemenkes melalui penyedia *display* foto secara periodik, produksi rilis berita program kesehatan, pengelolaan *website* Sehat Negeriku.

3. TIM KERJA PUBLIKASI MEDIA

LINGKUP TUGAS

Sosialisasi program dan edukasi kesehatan, penerbitan majalah Kemenkes (Mediakom), pengelolaan Siaran Radio Kesehatan (SRK), pengelolaan *Podcast* Kemenkes (Kemencast), pengelolaan media sosial Kemenkes, produksi konten media sosial terkait edukasi kesehatan, publikasi *paid media* melalui advertorial dan *talkshow*, penyusunan Buku Kinerja Kementerian Kesehatan.

4. TIM KERJA HUBUNGAN MEDIA DAN KELEMBAGAAN

LINGKUP TUGAS

Penyelenggaraan konferensi pers atau *media briefing* serta peliputan kegiatan Kemenkes dengan para jurnalis/media, *media visit* ke perusahaan pers, pelaksanaan *media coaching* bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, penyiapan bahan pimpinan (*talking point/briefing sheet*) terkait audiensi, penyelenggaraan *media coaching* bagi pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, koordinasi dan fasilitasi rohaniawan, koordinasi dan fasilitasi eksternal Kementerian/Lembaga/Organisasi non-pemerintah lainnya, fasilitasi kegiatan DPR (Raker, RDP, Kunjungan Kerja dan Sosialisasi GERMAS), *monitoring* setiap bulan tindak lanjut Raker/RDP ke unit terkait, koordinasi dan fasilitasi pembinaan wilayah provinsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

5. TIM KERJA PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan informasi (Pojoy Info, Halo Kemkes, Unit Layanan Terpadu (ULT), penayangan *signage* di lingkungan Kementerian Kesehatan), pengelolaan pengaduan masyarakat (unjuk rasa, Ombudsman, SP4N-LAPOR, dan media sosial pengaduan), penanggungjawab dalam penilaian kepatuhan standar layanan publik oleh Ombudsman, pengelolaan dan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, penyelenggaraan pemberian penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. TIM KERJA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Fasilitasi penilaian indeks pelayanan publik oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), pengelolaan forum konsultasi pelayanan publik, pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik, pengawasan, pengelolaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di unit utama dan unit pelaksana teknis Kemenkes.

7. TIM KERJA KOMUNIKASI INTERNAL DAN KEHUMASAN

LINGKUP TUGAS

Program pengembangan karir untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, koordinasi dengan Bakohumas dan Humas K/L lain, pengelolaan *cybertroops* di lingkungan Kemenkes, pelaksanaan *award* kehumasan, pengelolaan komunikasi internal terkait transformasi internal, pengelolaan konten terkait Biro Komunikasi dan Informasi Publik di *website* Sekretariat Jenderal.

8. TIM KERJA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

LINGKUP TUGAS

Pengembangan NSPK kepustakawanan, pengembangan karir untuk jabatan fungsional pustakawan, pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pustakawan, pembinaan dana akreditasi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, koordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan K/L lainnya terkait kepustakawanan, pengorganisasian bahan pustaka perpustakaan Kementerian Kesehatan, pengelolaan repository Kementerian Kesehatan.

9. TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN

LINGKUP TUGAS

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Biro, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Biro, pengelolaan layanan sumber daya manusia dan organisasi tata laksana, koordinasi pengelolaan kearsipan, koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, *monitoring* dan evaluasi kegiatan Biro, penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan.

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta Rencana Aksi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, maka dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pokok dan indikator pengelolaan komunikasi publik tahun 2026 yaitu:

Gambar 1.2: Kegiatan Pokok dan Indikator Biro Komunikasi dan Informasi Publik



1) Pengelolaan Strategi Komunikasi

Kegiatan indikator ini fokus untuk memonitor berbagai isu/opini kesehatan yang beredar di berbagai media pemberitaan, beberapa bentuk kegiatan yang dirancang seperti rapat, pertemuan evaluasi, konsinyasi, survei dan lain-lain.

2) Publikasi Melalui Media

Kegiatan indikator ini mencakup semua bentuk publikasi atau penyebarluasan informasi kebijakan/program Kesehatan kepada publik melalui media cetak, elektronik dan digital. Berbagai bentuk kegiatan dapat dirancang seperti *advertorial*, *talkshow*, *gathering* media, penulisan di Mediakom, temu media, *Podcast*, *reportase* berita kesehatan, ekspose pembangunan kesehatan di daerah bersama media, peliputan dan dokumentasi kegiatan kesehatan dan lain-lain.

3) Peliputan dan Dokumentasi

Kegiatan indikator ini mencakup penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, sekaligus peliputan, dokumentasi, serta produksi berbagai konten komunikasi (video, naskah,

infografis, rilis berita, dan taping) bagi pimpinan Kemenkes. Selain itu, tim juga melakukan sosialisasi program kesehatan melalui display foto, konten media, serta pengelolaan website *Sehat Negeriku*.

4) Pengelolaan Hubungan dengan Media dan Kelembagaan

Kegiatan indikatif mencakup komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta lembaga non pemerintah. Berbagai kegiatan lainnya dengan mitra yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik antara lain seperti rapat, pendampingan pimpinan dalam Raker/RDP dengan DPR/DPD, pendampingan pimpinan dalam kunjungan kerja bersama dewan, dan pendampingan pimpinan pada daerah binaan.

5) Pengelolaan Komunikasi Internal dan Kehumasan

Kegiatan indikatif mencakup pengembangan karir serta peningkatan kapasitas pranata humas dan pengelola kehumasan, sekaligus berkoordinasi dengan Bakohumas dan Humas K/L lainnya. Selain itu, tim kerja juga mengelola *cybertroops*, komunikasi internal, konten website, serta melaksanakan berbagai penghargaan kehumasan.

6) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan indikatif mencakup semua bentuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang diberikan sesuai permintaan publik. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti pelayanan informasi melalui *signage*, *contact center* 1500567, PPID, LAPOR, Pojok Info, dan ULT.

7) Penguatan Pelayanan Publik

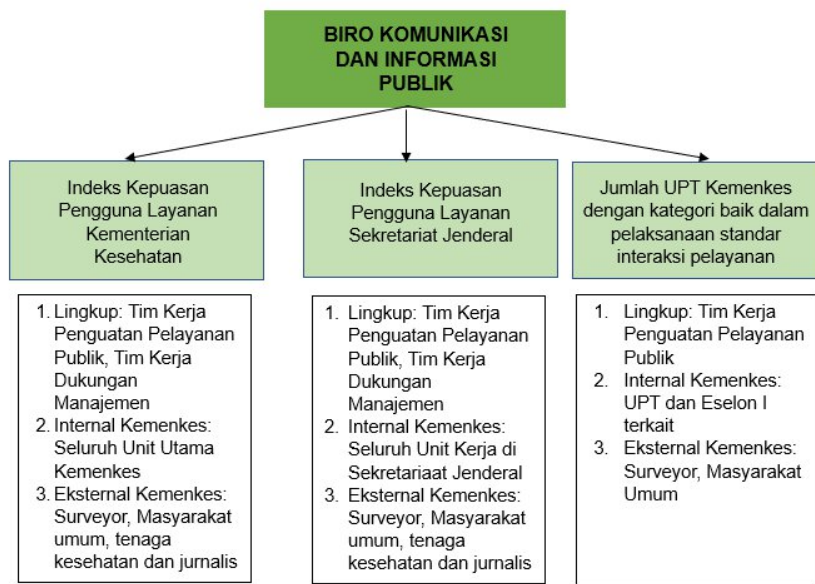
Kegiatan indikatif mencakup pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan penilaian kinerja dan reformasi birokrasi pelayanan publik yang termasuk kepatuhan standar layanan, indeks pelayanan, serta survei perilaku interaksi. Selain itu, tim kerja juga melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik dan menyelenggarakan penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kemenkes.

8) Dukungan Manajemen

Kegiatan indikatif ini mencakup penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran, BMN, SDM, organisasi tata laksana, kearsipan, serta urusan rumah tangga Biro. Selain itu, tim kerja juga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja, penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penindaklanjutan hasil audit.

Dalam upaya mencapai RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan dan program di lingkup Sekretariat Jenderal serta Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik maka disusunlah *crosscutting* kinerja di unit kerja sebagai berikut:

Gambar 1.3: Crosscutting Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik



D. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I TA 2026 disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja biro selama tahun berjalan. Laporan ini tidak hanya mencatat hasil kinerja selama tahun berjalan, tetapi juga membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memberikan perspektif mengenai tren dan perkembangan organisasi. Perbandingan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja unit kerja secara keseluruhan. Melalui analisis capaian kinerja, laporan ini juga mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Dengan pendekatan analitis tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik disusun sebagai berikut:

1. Bab I (Pendahuluan): menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, serta sistematika penyajian laporan.
2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja): menjelaskan Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, DO Indikator Kinerja Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja 2026 Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja): menjelaskan tentang capaian kinerja 3 tahun terakhir, Analisis Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026, sumber daya manusia, alokasi dan realisasi anggaran serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik selama Semester I Tahun 2026.

4. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut): berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 dan Rencana Tindak Lanjut.

1. Visi dan Misi

Pada Kabinet Merah Putih, visi dan misi Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat yang Sehat Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas”, adapun upaya mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi Kementerian Kesehatan yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup.
- 2) Membudayakan gaya hidup sehat.
- 3) Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.
- 4) Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
- 5) Memperkuat tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- 6) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju.
- 7) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Visi dan Misi tersebut merupakan visi misi bersama semua unit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi untuk tercapainya visi. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan telah ditetapkan tujuan strategis yaitu:

- 1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
- 2) Masyarakat berperilaku hidup sehat
- 3) Layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
- 4) Sistem ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
- 5) Tata kelola dan pendanaan Kesehatan yang efektif
- 6) Teknologi Kesehatan yang maju
- 7) Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta tujuan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik perlu mempublikasikan, mengkomunikasikan kebijakan/program pada semua *stakeholder* dan masyarakat luas secara masif termasuk hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai. Semua hal ini dituangkan dalam rencana kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik, untuk itu

telah ditetapkan tujuan strategis dalam perencanaan kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik:

- 1) Penguatan pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko.
- 2) Penguatan pengelolaan publikasi (media konvensional dan digital).
- 3) Peningkatan layanan informasi, pengaduan masyarakat, peliputan dan pendokumentasian hasil-hasil pembangunan kesehatan.
- 4) Penguatan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial secara profesional.
- 5) Penguatan koordinasi hubungan komunikasi dan jejaring antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- 6) Peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan.
- 7) Pengelolaan tata kelola administrasi umum Biro dengan baik, bersih dan transparan.

2.2 Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan promotif dan preventif
- 2) Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
- 3) Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat
- 4) Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan, dan laboratorium kesehatan
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
- 6) Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan
- 7) Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah
- 8) Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan
- 9) Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi Kesehatan
- 10) Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis
- 11) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Sebagai unit yang diberikan tugas pengelolaan publikasi dan pelayanan publik kementerian, maka sasaran kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik yaitu dengan:

“Meningkatkan akses dan kualitas publikasi komunikasi dan pelayanan publik menuju layanan prima dengan penekanan penguatan strategi komunikasi, penyediaan produk komunikasi berkualitas, SDM Pranata Humas dan Pustakawan

yang kompeten, penguatan koordinasi antar lembaga dan pengembangan jejaring dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dapat tercapai untuk kurun lima tahun ke depan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Gambar 3.2.: Sembilan Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik



3. Strategi

Untuk mewujudkan agenda pembangunan dalam RPJMN, maka Biro Komunikasi dan Informasi Publik menuangkan strategi dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai berikut:

Gambar 3.3: Strategi Publikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik



4. Indikator Kinerja

Merujuk pada revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan ditetapkan bahwa Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen satuan kerja. Untuk mencapai salah satu sasaran dari program yang dimaksud Biro Komunikasi dan Informasi Publik diberi amanah dalam menjaga citra dan reputasi Kementerian Kesehatan dengan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan publikasi dan pelayanan publik. Adapun berikut perbandingan Indikator Kinerja di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 3.1: Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2024-2026 (berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2024		2025		2026	
			T	R	T	R	T	R
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	B06: 89,36 B12: 90,17	83	89,67	N/A	N/A
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	44	40	41	70	0

Adapun semenjak disahkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 serta penyesuaian target kinerja pada Rencana Kerja TA 2026, Indikator Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengalami perubahan sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
2024-2026 (berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029
dan Perubahan Rencana Kerja 2026)**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2024		2025		2026	
			T	R	T	R	T	R
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	N/A	N/A	77	85,79	86	0
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	N/A	N/A	77	81,47	82	0
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	44	40	41	70	0

5. Definisi Operasional Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan berdasarkan 9 unsur layanan dengan range standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan 9 unsur layanan dengan range standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik.

2) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan

Definisi Operasional: Kategori baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian di atas 70.

Cara Perhitungan: Melakukan penilaian melalui survei dengan angka *range* standar penilaian sebagai berikut : 91-100 Prima; 81-90 Sangat Baik; 71-80 Baik; 61-70 Cukup; 51-60 Kurang; dan 0-50 Buruk.

B. Perjanjian Kinerja 2026

Gambar 3.3: Perjanjian Kinerja Tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien Sasaran Strategis 6.1 Memangkas biaya tata kelola Kementerian Kesehatan	IT 6 Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan** ISS 3.3 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan** G24 WA, Program Dukungan Manajemen	
	Sasaran Program: Memangkas Biaya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan** IKM 33.1 Nilai EAKIP Sekretariat Jenderal** IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal**	86 Nilai 70 Indeks
	2042. Kegiatan Pengabdian Komunitas dan Informasi Publik	IKK 33.1.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	82 Nilai
	Sasaran Kegiatan 1: Memangkas Pengabdian Komunitas dan Informasi Publik	IKK 33.1.15 Jumlah UPT Kementerian dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar internal pelayanan	70 UPT
		IKM 33.1.1 Indeks Kepuasan Pemustaka	82 Indeks
		IKM 33.1.2 Indeks Opini Publik terhadap Diakses Informasi Program dan Kebijakan Kementerian Kesehatan	87,5 Indeks

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKM 33.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Informasi dan Pengabdian Masyarakat	85 Indeks
		IKM 33.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengabdian Komunitas dan Kesehatan	100%
		IKM 33.1.5 Nilai EAKIP Unit Kerja	90%
		IKM 33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	83 Nilai
		IKD 33.1.1 Persentase Penanganan Komunitas Risiko	75%
		IKD 33.1.2 Persentase Penanganan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pratama dan Pustakawan di Kemendesa pada setiap jenjang setoran pada triwulan I Tahun 2026	100%

Keterangan:
 * Hasil dari Indikator Kinerja dan Target diangkas
 ** Indikator Kinerja yang tidak diangkas
 IKM: Indikator Kinerja Masyarakat (di Luar Revisi dan Revisi Ruang Lingkup Tunt)
 IKD: Indikator Kinerja Direktorat Program

Kegiatan Pengabdian Komunitas dan Informasi Publik	Anggaran Rp11.150.000.000
Pihak Kedua, Kunta Wibawa Dasa Nugraha	Jakarta, Januari 2026 Pihak Pertama, Aji Muhawarni

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029. Target capaian indikator kinerja kegiatan untuk tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan pengelolaan komunikasi publik adalah sebagai berikut:

a. Indikator Tujuan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik berperan dalam mendukung pencapaian Tujuan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien melalui penguatan komunikasi publik, keterbukaan informasi, dan tata kelola komunikasi yang baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan Nilai *Good Public Governance* Kementerian Kesehatan sebagai Indikator Tujuan Instansi.

b. Indikator Sasaran Strategis

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Kesehatan, melalui penyelenggaraan komunikasi publik yang efektif, pengelolaan informasi publik yang akuntabel, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dukungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebagai Indikator Sasaran Strategis.

c. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan internal Kementerian Kesehatan. Kontribusi tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan, yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan pendukung penyelenggaraan organisasi.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dengan sasaran kegiatan berupa Meningkatnya Pengelolaan Publikasi Komunikasi dan Informasi Publik. Sasaran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan komunikasi publik yang efektif, pengelolaan informasi publik yang transparan, serta penguatan kualitas layanan komunikasi kepada para pemangku kepentingan. Pencapaian sasaran kegiatan diukur melalui dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal; dan
2. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan kategori baik dalam pelaksanaan Standar Interaksi Layanan

d. Indikator Kinerja *Mandatory*

Indikator Kinerja *Mandatory* (IKM) merupakan indikator kinerja yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi utama Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam penyelenggaraan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan kehumasan dan kemitraan, serta penguatan tata kelola internal. Adapun Indikator Kinerja *Mandatory* (IKM) yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi dan Informasi Publik meliputi:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan;

2. Indeks Opini Publik terhadap Diseminasi Informasi Program dan Kebijakan Kementerian Kesehatan;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
4. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan dan Kemitraan;
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja; dan
6. Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja.

e. Indikator Kinerja Direktif

Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga mengampu Indikator Kinerja Direktif (IKD), yaitu indikator yang ditetapkan sebagai arahan strategis pimpinan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Eselon I Sekretariat Jenderal. Adapun Indikator Kinerja Direktif (IKD) yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi dan Informasi Publik meliputi:

1. Persentase Penanganan Komunikasi Krisis; dan
2. Persentase Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan pada setiap jenjang yang diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2026

Kedua indikator tersebut mendukung penguatan kapasitas organisasi dalam pengelolaan komunikasi strategis, khususnya dalam menghadapi isu dan krisis komunikasi, serta memastikan terselenggaranya pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian esensial dari manajemen yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2026, pengukuran kinerja dilakukan dengan menganalisis kesesuaian target dan realisasi dari setiap indikator kinerja kegiatan yang telah dirumuskan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang ditentukan.

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka akan ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan dibahas dalam rapat koordinasi staf rutin yang dihadiri pimpinan unit kerja, ketua tim kerja dan staf.

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu:

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan (IKP)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal (IKK); dan
3. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan (IKK)

Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu Rencana Strategis, namun demikian perubahan setiap tahun akan terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 3.1: Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja TA 2026

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	T	R
			2026	2026 (Semester I)
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029				
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indikator Kinerja Program		
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	78	0
		Indikator Kinerja Kegiatan		
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	78	0
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	70	0
Berdasarkan Rencana Kerja TA 2026				
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indikator Kinerja Program		
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	86	0
		Indikator Kinerja Kegiatan		
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat	82	0

		Jenderal		
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	70	0

Hingga periode pelaporan, capaian indikator masih sebesar 0 (nol) karena pengukuran masih dalam tahap persiapan survei yaitu penyusunan kuesioner. Kondisi ini masih sesuai dengan rencana (on track), mengingat survei dijadwalkan berlangsung hingga Triwulan III. Karena indikator diukur dalam bentuk indeks, nilai capaian baru dapat diperoleh setelah seluruh tahapan survei selesai dilaksanakan dan hasilnya diolah menjadi nilai indeks. Dengan demikian, belum adanya capaian pada periode ini tidak mencerminkan keterlambatan pelaksanaan, melainkan merupakan konsekuensi dari metode pengukuran indikator yang baru dapat dihitung pada akhir pelaksanaan survei. Adapun uraian capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Indikator

INDIKATOR KINERJA PROGRAM:

Tabel 3.2: Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program TA 2026

Program / Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Renja	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	78	86	0

Definisi Operasional:

Hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenPANRB tersebut.

Definisi operasional digunakan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman mengenai aspek-aspek yang dievaluasi, sedangkan pengukuran dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap 10 aspek layanan yang diukur dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Kesehatan Tahun 2025, yang meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana termasuk sarana dan prasarana online. Seluruh variabel tersebut diukur menggunakan skala sikap 1–4 (1 = sangat tidak puas sampai dengan 4 = sangat puas) yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Metode

Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan dilakukan melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan secara nasional dengan pendekatan mixed methods, yaitu kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei tatap muka (*face-to-face interview*) dan survei daring (*online survey*), sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait kualitas layanan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

Survei dilaksanakan terhadap 4.000 responden kuantitatif yang terdiri atas 400 responden survei tatap muka dan 3.600 responden survei daring, serta didukung oleh 12 narasumber kualitatif. Responden merupakan masyarakat berusia 17–60 tahun yang pernah memanfaatkan layanan satuan kerja Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pelaksanaan survei mencakup 8 satuan kerja Unit Utama dan 224 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penentuan sampel dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan distribusi pengguna layanan pada masing-masing satuan kerja dan wilayah (barat, tengah, dan timur). Sementara itu, survei tatap muka dilaksanakan di enam kota, yaitu Medan, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Makassar, dan Jayapura, sedangkan survei daring menjangkau responden secara nasional. Hasil pengukuran kemudian diolah menjadi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan, yang menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) Program Dukungan

Manajemen dan digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas layanan serta penyusunan rekomendasi perbaikan layanan di lingkungan Kementerian Kesehatan

INDEKS KINERJA KEGIATAN (IKK) PERTAMA:

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Tabel 3.3: Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program (IKK) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal TA 2026

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Renja	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	82	0

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada lingkup Sekretariat Jenderal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu rangkaian Survei Kepuasan Pengguna Layanan di tingkat Kementerian Kesehatan, maka definisi operasional, metode pengumpulan data, instrumen, serta tahapan pelaksanaannya disusun dan dilaksanakan secara seragam. Keseragaman ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi metodologis, menjamin keterbandingan hasil antar unit kerja, serta memastikan bahwa pengukuran kepuasan pengguna layanan dilakukan berdasarkan standar nasional yang sama, sebagaimana pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang berlaku.

Perbedaan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada lingkup Sekretariat Jenderal dengan survei pada tingkat Kementerian Kesehatan terletak pada penetapan target responden. Apabila survei tingkat Kementerian Kesehatan mencakup pengguna layanan dari seluruh satuan kerja Kementerian Kesehatan, maka pada lingkup Sekretariat Jenderal responden dibatasi hanya pada pengguna layanan yang menerima layanan dari unit Eselon II di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Selain itu, jumlah target responden pada lingkup Sekretariat Jenderal ditetapkan sebanyak 175 responden yang seluruhnya berasal dari wilayah barat. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan *mixed methods* dengan proporsi 17 responden melalui wawancara tatap muka (*face-to-face interview*) dan 158 responden melalui survei daring (*online survey*). Perbedaan cakupan responden tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup layanan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal, sedangkan definisi

operasional, metodologi, instrumen, dan mekanisme pengukuran tetap mengacu pada standar yang sama dengan Survei Kepuasan Pengguna Layanan tingkat Kementerian Kesehatan.

Gambar 3.X Kick Off Survei Kepuasan Pengguna Layanan



Hasil/Keluaran

Sampai dengan periode pelaporan, hasil/keluaran kegiatan belum tersedia karena pelaksanaan survei masih berlangsung sesuai dengan rencana dan dijadwalkan selesai hingga Triwulan III. Oleh karena itu, hasil pengukuran baru dapat disajikan setelah seluruh tahapan survei, pengolahan data, dan analisis selesai dilaksanakan. Adapun progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut:

- a) Januari: Tahap persiapan penyelenggaraan survei
- b) Februari: Tahap persiapan penyelenggaraan survei serta mengimbau unit kerja menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan TA 2025
- c) Maret-Mei: Proses pemetaan lokus Survei Kepuasan Pengguna Layanan TA 2026
- d) Juni: Kickoff Survei Kepuasan Pengguna Layanan TA 2026

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- 1) Pengalaman pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan Kementerian Kesehatan
- 2) Kesesuaian kualitas aspek layanan terhadap standar pelayanan yang berlaku

b) Permasalahan

- 1) Perbedaan kualitas pelayanan di masing-masing unit pemberi layanan
- 2) Ketidaksesuaian kriteria responden yang mengisi survei
- 3) Pemahaman responden terhadap pemberi layanan

c) Pemecahan Masalah

- 1) Penyampaian laporan hasil survei tahun sebelumnya beserta analisa perbaikan layanan kepada unit utama

- 2) Penyesuaian data sampel responden oleh enumerator sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan

d) Rencana Tindak Lanjut

- 1) *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan pengguna layanan
- 2) Evaluasi berkala pelaksanaan teknis survei untuk diaplikasikan pada survei di tahun berikutnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KEDUA:

Jumlah UPT Kemenkes Dengan Kategori Baik Dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan

Tabel 3.4: Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program (IKK) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal TA 2026

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	70 UPT	0

Definisi Operasional:

Kategori “Baik” dalam indikator ini didefinisikan sebagai jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian di atas 77. Adapun indikator ini belum memiliki realisasi pada periode pelaporan karena pelaksanaan kegiatan pengukuran masih berlangsung dan dijadwalkan dilaksanakan hingga Triwulan III. Oleh karena itu, capaian indikator baru dapat dihitung dan ditetapkan setelah seluruh tahapan pelaksanaan, pengumpulan data, serta pengolahan hasil telah selesai dilaksanakan. Proses pelaksanaan survei ini tergambar dalam skema berikut:

Gambar 3.1. Skema Pelaksanaan Survei Kepatuhan Interaksi Layanan



Seluruh UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan telah terpapar dengan prinsip *service excellence* agar UPT mampu menyusun rencana aksi peningkatan standar perilaku interaksi layanan sehingga *monitoring* standar perilaku interaksi layanan dapat dilakukan. Selanjutnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menjalankan pengawasan standar perilaku interaksi layanan sehingga pelaksanaan standar perilaku interaksi layanan yang dilakukan pada satuan kerja tersebut dapat dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode

- Pengukuran indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan dan Kemitraan dilaksanakan menggunakan metode *Mystery Guest*, yaitu suatu pendekatan evaluasi kualitas layanan publik yang dilakukan oleh evaluator yang berperan sebagai pengguna layanan (masyarakat umum) tanpa mengungkapkan identitasnya sebagai penilai. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kualitas penyelenggaraan layanan berdasarkan pengalaman nyata yang dirasakan oleh pengguna layanan.
- Penilaian kesesuaian layanan dengan standar pelayanan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014). Adapun kriteria penilaiannya adalah:

Tabel 3.5 Standar Pelayanan berdasarkan PermenpanRB Nomor 31 Tahun 2014

Nilai	Kriteria
91%-100%	Prima
81%-90%	Sangat Baik
71%-80%	Baik
61%-70%	Cukup

Nilai	Kriteria
51%-60%	Kurang
0%-50%	Buruk

- c) Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Sampel dalam pengukuran ini adalah 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan
- d) Adapun titik layanan yang menjadi objek penilaian meliputi area parkir, pelayanan keamanan (*security*), bagian informasi, pendaftaran, pelayanan perawat, pelayanan dokter, pelayanan farmasi, pelayanan kasir, sarana dan prasarana pelayanan, serta *contact center*.

Objek Survei Penilaian Standar Perilaku Interaksi Layanan Tahun 2026

Terdapat 46 UPT yang menjadi lokus/lokasi target penilaian pada tahun 2026, adapun daftar lokus/lokasi survei kepatuhan sebagai berikut:

Rumah Sakit

- 1) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- 2) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
- 3) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang
- 4) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena AmbON
- 5) Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
- 6) Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
- 7) Rumah Sakit Vertikal Surabaya
- 8) Rumah Sakit Vertikal Makassar
- 9) Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan

Balai Laboratorium Kesehatan

- 1) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
- 2) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga
- 3) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
- 4) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
- 5) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
- 6) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
- 7) Balai Laboratorium Kesehatan Palembang

- 8) Balai Laboratorium Kesehatan Ambon
- 9) Balai Laboratorium Kesehatan Banjarnegara

Balai Kekarantinaan Kesehatan

- 1) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
- 2) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta
- 3) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
- 4) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan
- 5) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
- 6) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan
- 7) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
- 8) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap

Balai Pelatihan Kesehatan

- 1) Balai Pelatihan Kesehatan Batam
- 2) Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
- 3) Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

Politeknik Kesehatan Kemenkes

- 1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II
- 2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
- 3) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi
- 4) Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
- 5) Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
- 6) Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin
- 7) Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado
- 8) Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
- 9) Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar
- 10) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari
- 11) Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
- 12) Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh
- 13) Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate
- 14) Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Pinang
- 15) Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong

Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepatuhan Interaksi

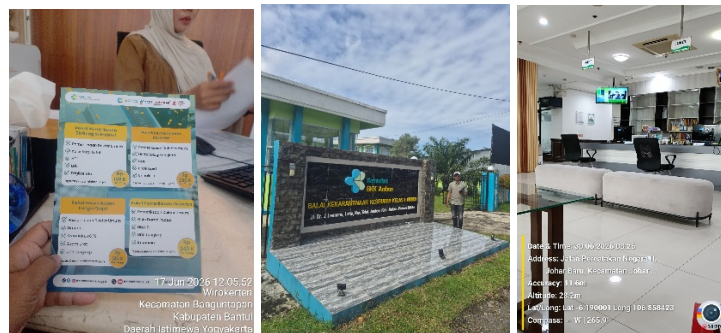
Kegiatan survei diawali dengan **tahap persiapan** sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan survei dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan instrumen survei berupa checklist/kuesioner yang disusun berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya, disusun panduan pelaksanaan survei yang memuat tata cara pelaksanaan, metode pengumpulan data, mekanisme observasi, teknik pengisian instrumen, serta ketentuan penilaian guna menjamin keseragaman pelaksanaan survei pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk memastikan pemahaman yang sama di antara seluruh pelaksana survei, dilakukan pula briefing kepada tim surveyor yang mencakup penyampaian tujuan kegiatan, ruang lingkup penilaian, pembagian tugas, serta penyamaan persepsi terhadap indikator dan kriteria penilaian sehingga hasil survei yang diperoleh bersifat objektif, konsisten, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Setelah seluruh tahapan persiapan selesai dilaksanakan, kegiatan memasuki tahap pelaksanaan yang diawali dengan pengumpulan informasi awal sebagai bahan pendukung pelaksanaan survei pada masing-masing UPT. Selanjutnya, tim survei melaksanakan observasi lapangan, melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, serta melakukan pengisian checklist berdasarkan hasil pengamatan terhadap pemenuhan indikator yang telah ditetapkan. Seluruh proses pelaksanaan survei didukung dengan dokumentasi berupa foto, video, maupun rekaman sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bahan verifikasi hasil penilaian. Hingga saat ini, survei telah dilaksanakan pada 20 dari total 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- 2) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
- 3) Rumah Sakit Vertikal Surabaya
- 4) Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan Jakarta
- 5) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
- 6) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta
- 7) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan
- 8) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
- 9) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan
- 10) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap
- 11) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
- 12) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
- 13) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta

- 14) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
- 15) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
- 16) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
- 17) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
- 18) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
- 19) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
- 20) Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh.

Gambar 3.2 Pelaksanaan Survei Interaksi Layanan



Selanjutnya, UPT tersebut akan mendapat kunjungan *monitoring* evaluasi secara rahasia oleh SDM yang terdiri dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Satuan kerja pembina di atasnya sebagai contoh apabila terkait pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di rumah sakit, maka satuan kerja yang terlibat adalah Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan.

Kemudian hasil *monitoring* dipaparkan dihadapan manajemen dan pimpinan UPT pada hari terakhir kunjungan. Petugas juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan pelayanan selanjutnya. Rekomendasi disertai dengan hasil temuan beberapa interaksi layanan yang untuk mendapat perhatian untuk perbaikan.

Sosialisasi Program ke SDM Institusi Layanan UPT

Program penilaian kepatuhan interaksi pelayanan publik yang sudah dibakukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 33 tahun 2019 ini sudah disosialisasikan melalui Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Dalam edaran tersebut menjelaskan mekanisme penilaian dan rentang waktu penilaian yang sudah ditetapkan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada unit pelaksana teknis (UPT) untuk memberikan penjelasan merinci mengenai alat penilaian/*tools*/borang yang dapat UPT pelajari dan melakukan penilaian secara mandiri.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- 1) Pengalaman masyarakat terhadap penerimaan pelayanan publik dari UPT di lingkungan Kementerian Publik
- 2) Pembinaan kepada unit layanan publik yang akan menjadi sampel penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

b) Permasalahan

- 1) Belum optimalnya komitmen UPT dalam mengimplementasikan standar interaksi pelayanan publik
- 2) Belum optimalnya implementasi tindak lanjut dari survei standar interaksi pelayanan publik sebelumnya

c) Pemecahan Masalah

- 1) Perlu penguatan pembinaan dari Unit Eselon I bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- 2) Dilakukan pemetaan awal dan monitoring kegiatan tindak lanjut survei kepatuhan pelayanan publik di lingkungan UPT Kementerian Kesehatan secara berkala

d) Rencana Tindak Lanjut

- 1) Melakukan pembinaan dan sosialisasi Permenkes Nomor 33 Tahun 2019 secara luring dengan konsep *roleplay* oleh petugas *frontliner*.
- 2) Melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan Unit Eselon I sehingga UPT terkait dapat melakukan *self-assessment* terlebih dahulu dengan indikator yang ada.
- 3) Mengupayakan pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik setelah lokus mempersiapkan diri dengan perbaikan layanan publiknya.
- 4) Melakukan *monitoring* dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik melalui Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri institusional.

PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENDUKUNG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik tidak hanya berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dapat memiliki

hubungan langsung dengan capaian IKK atau bersifat tidak langsung, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Indikator pendukung yang dimaksud mencerminkan elemen-elemen tambahan yang berperan dalam memperkuat capaian. Indikator pendukung yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi Komunikasi

1. Media Monitoring di Media Massa dan Media Digital dan Analisis Pemberitaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai salah satu tugas strategis, yaitu melakukan pengelolaan opini publik dan manajemen isu. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan media monitoring terhadap media massa dan media sosial dengan memanfaatkan media monitoring online tools yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis *big data* pemberitaan serta percakapan publik secara cepat dan komprehensif. Pemanfaatan *media monitoring online tools* merupakan upaya Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam menyesuaikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin dinamis. Melalui perangkat tersebut, berbagai publikasi pada media cetak, media daring, media elektronik, maupun media sosial dapat dipantau secara berkelanjutan untuk mendeteksi isu, tren opini publik, sentimen masyarakat, serta potensi risiko komunikasi sejak dini.

Kegiatan media monitoring dilaksanakan setiap hari kerja secara berkesinambungan dan dilakukan secara kolaboratif bersama Humas Unit Utama, tim teknis, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hasil pemantauan kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam Laporan Media Monitoring serta Laporan Media Monitoring Isu Khusus sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan strategi komunikasi. Melalui pelaksanaan media monitoring yang sistematis dan berkelanjutan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat mengidentifikasi isu-isu strategis, memantau perkembangan opini publik, serta menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif, adaptif, dan responsif. Selain itu, hasil media monitoring juga menjadi instrumen *early warning system* untuk mengantisipasi potensi krisis komunikasi, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dengan demikian, kegiatan media monitoring mendukung terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a) Menggunakan media *monitoring online tools* untuk media massa. Biro Komunikasi dan Informasi Publik berperan selaku admin utama, perangkat ini juga dapat digunakan oleh para pejabat fungsional Hubungan Masyarakat di unit utama lainnya di lingkungan

Kementerian Kesehatan sebagai *user* untuk mengolah data media *monitoring* sesuai kebutuhannya masing-masing.

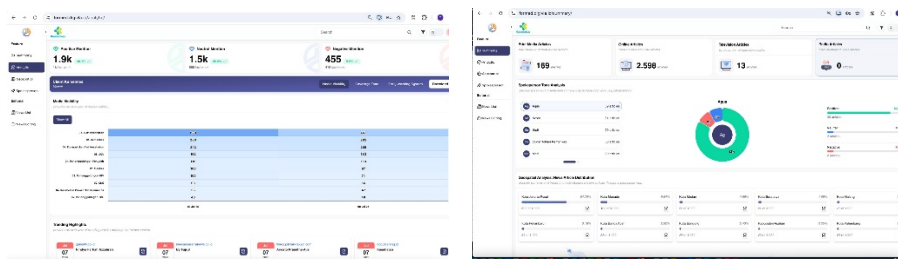
- b) Menggunakan media *monitoring online tools* untuk media sosial bekerja sama dengan *tools* ini juga dapat diakses oleh pengguna di luar Biro Komunikasi dan Informasi Publik guna membantu unit utama/satuan kerja terkait dalam memantau perkembangan percakapan warganet di media sosial.
- c) Adapun isu khusus merupakan isu-isu strategis lainnya yang berkembang di media massa maupun media sosial dan memerlukan penanganan komunikasi secara cepat
- d) Berbagai berita dan isu yang termonitor diolah, dianalisis, dan dilaporkan secara berkala (harian pagi dan sore, mingguan, bulanan dan tahunan).

Dengan mengimplementasikan proses tersebut, kegiatan media *monitoring* tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif. Adapun hasil/keluaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Kegiatan Pelaporan Media Monitoring

Kegiatan	Periode					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pelaporan Media Monitoring (Media Massa dan Media Sosial)	20	18	17	21	16	19
Pelaporan Isu Khusus	1	1	1	0	1	0

Gambar 3.X: Media Monitoring Tools



2. Agenda Setting Biweekly

Agenda Setting Biweekly merupakan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik bersama unit utama terkait

untuk membahas rencana komunikasi berdasarkan isu-isu kesehatan yang sedang berkembang. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi isu yang menjadi perhatian publik, menyusun prioritas komunikasi, serta menyepakati strategi dan rencana diseminasi informasi yang akan dilaksanakan dalam periode dua minggu berikutnya. Melalui *Agenda Setting Biweekly*, unit utama teknis yang memiliki isu, agenda program, maupun kebijakan yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan komunikasi publik dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, serta selaras dengan dinamika isu yang berkembang. Dengan demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih tepat waktu, relevan, dan efektif dalam mendukung program-program Kementerian Kesehatan. Berikut merupakan frekuensi pelaksanaan kegiatan ini selama semester I TA 2026:

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kegiatan *Agenda Setting Biweekly*

Kegiatan	Periode					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
<i>Agenda Setting Biweekly</i>	2	2	2	2	2	2

3. Kegiatan Manajemen Hoaks bersama Lintas Program dan Kementerian/Lembaga Terkait

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi kesehatan yang akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melakukan penanganan hoaks dan disinformasi kesehatan. Kolaborasi ini dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan respons cepat terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan, disertai penyebarluasan informasi yang benar dan berbasis bukti. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, meminimalkan penyebaran hoaks kesehatan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi dan kebijakan kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kegiatan Manajemen Hoaks

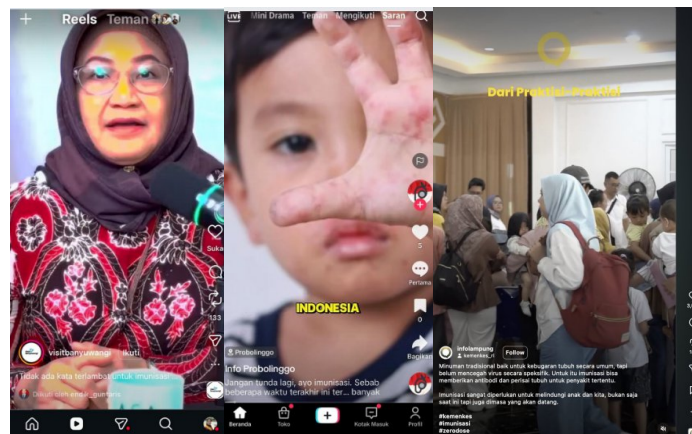
Kegiatan	Periode					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Manajemen Hoaks	0	2	5	0	3	x

Lintas Program dan Kementerian/Lembaga Terkait						
--	--	--	--	--	--	--

4. Amplifikasi Konten Imunisasi di Media Digital

Masih terdapatnya kesenjangan cakupan imunisasi serta keberadaan anak *zero dose* menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Kondisi tersebut diperkuat dengan meningkatnya kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan kegiatan amplifikasi konten komunikasi publik terkait imunisasi melalui media digital. Kegiatan ini didukung oleh pendanaan GAVI Tahun 2026 dan dilaksanakan oleh penyedia jasa pada periode 14 April sampai dengan 5 Juni 2026. Selama periode pelaksanaan, telah dilakukan amplifikasi terhadap 8 konten komunikasi dengan total jangkauan sebesar 18,1 juta *views*, melampaui target yang ditetapkan sebesar 10 juta *views* atau mencapai 181% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan amplifikasi konten melalui media digital telah berjalan secara efektif dalam memperluas jangkauan informasi mengenai pentingnya imunisasi kepada masyarakat serta mendukung keberhasilan strategi komunikasi program imunisasi Kementerian Kesehatan.

Gambar 3.X Amplifikasi Konten Imunisasi di Media Digital



Adapun rekapitulasi jumlah konten komunikasi publik terkait imunisasi yang diamplifikasi selama periode pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Kegiatan Amplifikasi Konten Imunisasi di Media Digital

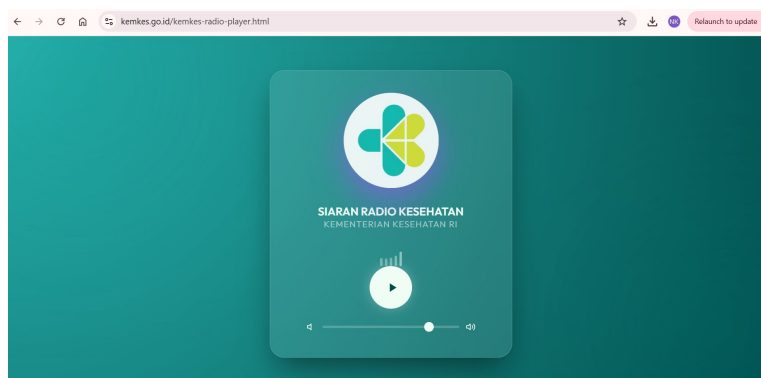
Kegiatan	Periode					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Amplifikasi Konten Imunisasi di Media Digital	-	-	-	50	25	6

Publikasi Media

1. Siaran Radio Kesehatan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengelola layanan Radio Kesehatan sebagai salah satu media diseminasi informasi kesehatan kepada masyarakat. Layanan *streaming* Radio Kesehatan dapat diakses melalui menu pada laman resmi Kementerian Kesehatan maupun melalui <https://s.kemkes.go.id/radiokesehatan>. Melalui media ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyebarluaskan berbagai informasi mengenai program, kebijakan, serta edukasi kesehatan guna mendukung peningkatan literasi kesehatan masyarakat dan memperluas jangkauan komunikasi publik Kementerian Kesehatan

Gambar 3.X Siaran Radio Kesehatan di Website Kemenkes



Sebagai media komunikasi publik, Radio Kesehatan menyajikan berbagai program siaran yang bertujuan memberikan informasi kesehatan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun program-program yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

a) Siaran Sehat

Program Siaran Harian merupakan program unggulan Radio Kesehatan yang disiarkan setiap hari kerja oleh penyiar Studio Radio Kesehatan (SRK) dengan konsep penyampaian yang ringan, segar, dan informatif. Program ini bertujuan menyebarluaskan informasi, edukasi, dan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui format siaran

yang mudah dipahami dan menarik. Adapun program siaran harian tersebut terdiri atas Indonesia Sehat Pagi, Indonesia Sehat Siang, Musik 20, serta Indonesia Sehat Sore.

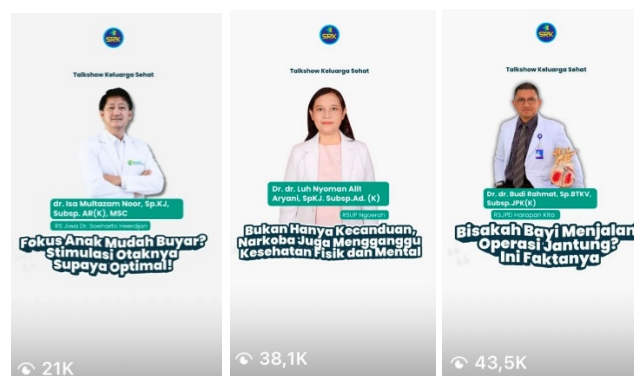
Gambar 3.X: Siaran Sehat Harian oleh Penyiar Radio SRK



b) Talkshow Keluarga Sehat

Talkshow Keluarga Sehat merupakan salah satu program siaran Radio Kesehatan yang membahas berbagai informasi dan isu kesehatan terkini melalui format dialog interaktif. Program ini diselenggarakan secara daring dengan menghadirkan narasumber yang berasal dari praktisi kesehatan maupun pemangku kepentingan yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung (*live*) melalui akun Instagram Kementerian Kesehatan sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan masyarakat melalui sesi tanya jawab. Melalui program ini, diharapkan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya dapat tersampaikan secara lebih luas serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu kesehatan yang sedang berkembang.

Gambar 3.X Talkshow Keluarga Sehat



c) Berita Kesehatan

Segmen Berita Kesehatan merupakan bagian dari program siaran Radio Kesehatan yang menyajikan informasi kesehatan terkini kepada masyarakat. Pada setiap program siaran, penyiar Studio Radio Kesehatan (SRK) membacakan sebanyak 4–5 berita

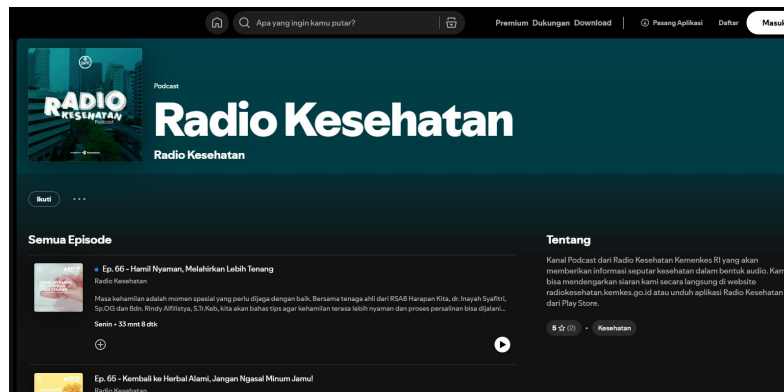
Gambar 3.X Naskah Adlibs

ADLIBS CEGAH STUNTING	ADLIBS STOP TB
SOBAT SEHAT!! STUNTING ADALAH MASALAH KURANG GIZI KRONIS/ ATAU KURANGNYA ASUPAN GIZI DALAM WAKTU YANG CEPAT LAMAT/ SEHINGGA MENGAKIBATKAN GANGGUAN PERTUMBUHAN PADA ANAK/ YAKNI TUBUH BAKAN ANAK/ SEHINGGA KURANG TENDI/ KESUKU DAN STAGNAN/ USAMNYA/ TIGA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING/ YAKNI PERBAIKAN TERHADAP POLA MAKAN/ POLA ASUP/ SETIA PERBAIKAN SANITASI DAN ASES AIR BERSIH/ DAN HAL TERSEBUT BISA KITA LAKUKAN/ SESEK/ SINGKAT/ SINGKAT/ • PENTINGNYA CALON IBU/ MEMERIKSA KANDUNGAN EMPAK KALI SELAMA KEHAMILAN/ • BAYI MENDAPAT COLOSTRUM AIR SUSU IBU/ DAN SELANUTNYA HANYA MEMBERIKAN ASI SAKA UNTUK BAYI SAMPAI BERUSAHA 6 BULAN/ • PERBAIKAN KONSUMSI SUMBER PROTEIN/ BAYI ANAK-ANAK DALAM MASA PERTUMBUHAN/ DI SAMPING ITU TETAP MEMBAKARKAN UNTUK MENGONSUMSI BUAH DAN SAYUR/ • PANTAU TUMBUH KEMAMPUAN DENGAN MEMBAWA BUAH HATI KE POSYANDU SETIAP BULAN/ BERIKUT BISA HAK ANAK/ UNTUK MENGETAHUI KESEKALAN/ DAN TERJADI BERBAHAYA MELALUI BUNYI/ • ANAK – ANAK PERLU MEMBAKARKAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN DENGAN AIR MENGALIR/ SETIA TIDAK BUAH AIR BERSIH/ SENGANG/ JADI SOBAT SEHAT/ HARAPAN KITA TUNTUNYA ANAK-ANAK INDONESIA DAPAT TUMBUH DAN BERKEMBANG SECARA OPTIMAL/ DAN MAMPU/ DENGAN KESEKALAN/ KANDUNGAN/ SENGANG/ DAN PERLU SIAP UNTUK BELAU/ SETIA MAMPU BERINOVASI/ DAN BERKOMPETISI/ DI DUNIA/ GLOBA/	SOBAT SEHAT!! TUBERKULOSIS ATAU TB/ DAN JUGA DISEKALAN/ DENGAN SEBUTAN TB/ INI MERUPAKAN PENYAKIT MENULAR YANG DISEBABKAN KUNAN TB/ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS/ YANG MAUKU KE TURUN/ MELALUI PENYARAS/ TB MERUPAKAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR/ YANG DAPAT MENYERANG BERBAGAI ORGAN/ TERUTAMA PARU-PARU/ PENULARAN TB SENDIRI TERJADI MELALUI UDARA YANG MENGANDUNG PERICAN DAKAH PENDEKITA TB/ TB DAPAT DICIGA/ KETIKA KONDISI DAYA TAHUN TUBUH ATAU KESEKALAN/ TUBUH KITA KUAT/ MAKA SOBAT SEHAT/ JAGALAH/ KESEKALAN/ TUBUH KITA DENGAN MENJAGA/ KESEKALAN/ DAN MENYARAP/ PERILAU/ MUP/ BERSIH/ DAN SEHAT/ (PHEU/ SEBES/) • MAKAN TERATUR/ DENGAN MENI/ SEKANG/ SETIA CUKUP SAYUR DAN BUAH/ • MENAGA/ KESEKALAN/ DIN/ DAN LINGKUNGAN/ RUDIP/ • BEROLAHRAHA/ DENGAN BAKAR/ CUKUP/ DAN TERATUR/ • TIDAK/ MEROKOK/ TIDAK/ MENGONSUMSI/ ALKOHOL/ DAN TIDAK/ MENYALAHGUNAKAN/ NAPZA/ • BERSITIHAT/ CUKUP/ DAN TERATUR/ • DAN SEGERA/ BERIKAT/ JIKA SAKIT/ FOKUS/ BERGAMA/ DALAM PENCEGAHAN/ DAN PENGEKALAN/ TB/ ADALAH/ PENEMUAN/ KASUS/ DAN PENGEKALAN/ MAKA/ SETIAP/ PASIEN/ TB/ HARUS/ DITEMUKAN/ DAN DIBIKAT/ SAMPAI/ SEMBUH/ AGAR/ PENULARAN/ TB/ DI/ INDONESIA/ DAPAT/ DIHENTIKAN/ PERAN/ KELUARGA/ PADA/ GERAKAN/ INI/ SANGAT/ PENTING/ KARENA/ SEMANGAT/ DAN/ KEPATIHAN/ PASIEN/ UNTUK/ MINUM/ DAN/ MENELAN/ OBAT/ DITENTUKAN/ OLEH/ DOKTER/ DAN/ KELUARGA/ © 2019 PT. RADIO KESIHATAN KEMENKES RI. SEMUA HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang.

f) Platform Digital Spotify

Konten digital Spotify merupakan salah satu media diseminasi informasi kesehatan yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik melalui akun Spotify Radio Kesehatan. Konten yang dipublikasikan berupa rekaman siaran (*relay*) Radio Kesehatan dan program *Talkshow Keluarga Sehat*, sehingga masyarakat dapat mengakses kembali materi siaran secara fleksibel sesuai kebutuhan. Pemanfaatan platform Spotify diharapkan dapat memperluas jangkauan pendengar, meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi kesehatan, serta mendukung penyebaran informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui media digital.

Gambar 3.X Akun Spotify Radio Kesehatan

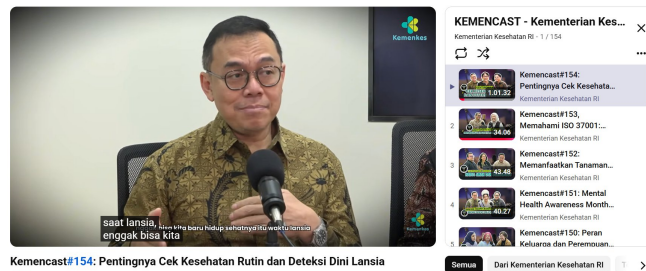


g) Podcast (Kemencast)

Kemencast (Kementerian Kesehatan Podcast) merupakan salah satu media komunikasi digital yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk menyebarkan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Berbeda dengan siaran langsung Radio Kesehatan, Kemencast disajikan dalam format rekaman audio dan visual yang menampilkan dialog antara *host* dan narasumber mengenai berbagai topik kesehatan.

Setelah proses perekaman (*taping*), materi podcast melalui tahapan penyuntingan (*editing*) sebelum dipublikasikan melalui akun YouTube Kementerian Kesehatan RI. Melalui format podcast, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan secara fleksibel sesuai waktu yang diinginkan, sehingga mendukung perluasan jangkauan diseminasi informasi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan.

Gambar 3.X Konten Kemencast



Tabel 3.9 Capaian Kinerja Kegiatan Siaran Radio Kesehatan

Kegiatan	Periode					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Siaran Sehat	50	43	41	45	32	36
Talkshow Keluarga Sehat	18	13	8	12	9	13
Berita Kesehatan	101	119	92	128	98	110
Iklan Layanan Masyarakat	525	375	425	525	257	152
Adlibs	42	35	28	63	18	20
Platform Digital Spotify	7	6	8	4	5	5
Podcast (Kemencast)	1	0	2	4	6	2

2. Pengelolaan Media Sosial

Tim Kerja Publikasi Media juga mengelola berbagai media sosial diantaranya Instagram, X.com, TikTok, YouTube, dan Facebook, serta WA Channel. Setiap media sosial dikelola untuk menyampaikan berbagai informasi di Kementerian Kesehatan mulai dari kegiatan pimpinan (Menkes, Wamenkes, dan Setjen), ucapan hari-hari besar, serta informasi dan edukasi seputar isu kesehatan lainnya.

a) Instagram

Instagram @kemenkes_ri merupakan akun resmi Kementerian Kesehatan yang dimanfaatkan sebagai salah satu kanal komunikasi publik untuk menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat. Konten yang dipublikasikan meliputi video vertikal serta konten visual berupa poster dan infografis yang berisi informasi mengenai program, kebijakan, dan edukasi kesehatan. Konten video vertikal antara lain menampilkan rangkuman (*recap*) atau sorotan (*highlight*) kegiatan Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan, serta video edukasi dan informasi kesehatan yang dikemas mengikuti tren media sosial agar lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Hingga akhir Juni 2026, akun Instagram @kemenkes_ri telah memiliki lebih dari 3,3 juta pengikut, yang mencerminkan tingginya jangkauan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi dan komunikasi publik Kementerian Kesehatan.

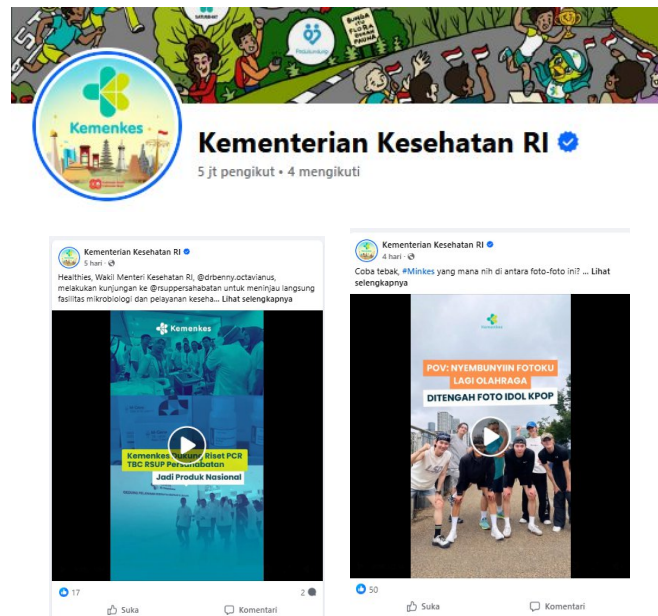
Gambar 3.X Konten di Instagram Kemenkes RI



b) Facebook

Facebook Kementerian Kesehatan RI merupakan salah satu kanal media sosial resmi yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi, edukasi, serta publikasi program dan kebijakan Kementerian Kesehatan kepada masyarakat. Konten yang dipublikasikan pada akun Facebook pada umumnya merupakan adaptasi dari konten Instagram @kemenkes_ri, dengan penyesuaian gaya penyampaian dan narasi (*caption*) agar sesuai dengan karakteristik pengguna platform Facebook. Melalui pengelolaan konten yang konsisten, akun Facebook Kementerian Kesehatan RI menjadi salah satu media komunikasi publik yang mendukung perluasan jangkauan diseminasi informasi kesehatan. Hingga akhir Juni 2026, akun Facebook Kementerian Kesehatan RI telah memiliki lebih dari 5 juta pengikut.

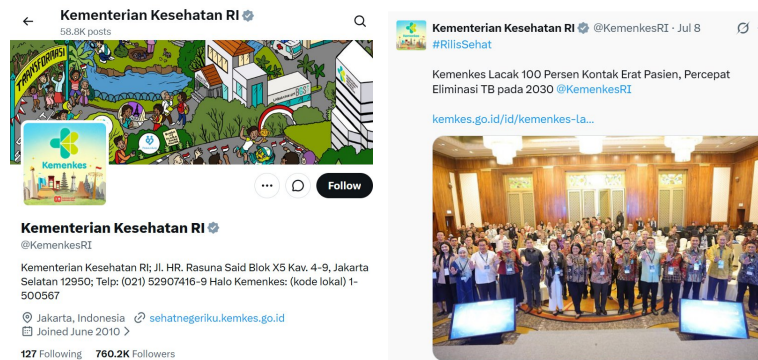
Gambar 3.X Konten Facebook Kemenkes RI



c) X.com (Twitter)

X.com atau Twitter Kemenkes merupakan media sosial resmi pertama yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan dimanfaatkan sebagai kanal komunikasi publik untuk menyampaikan informasi kesehatan secara cepat dan interaktif. Platform ini digunakan untuk menyebarluaskan informasi melalui unggahan (*post*), berinteraksi dengan masyarakat, serta membangun percakapan melalui penggunaan tagar (*hashtag*) yang relevan dengan isu kesehatan. Selain sebagai media diseminasi informasi, akun X juga berperan sebagai sarana pemantauan isu kesehatan dan opini publik yang berkembang di media sosial, sehingga mendukung identifikasi isu strategis serta penyusunan respons komunikasi secara cepat dan tepat. Hingga akhir Juni 2026, akun @KemenkesRI telah memiliki lebih dari 760 ribu pengikut, yang menunjukkan perannya sebagai salah satu kanal komunikasi digital dalam mendukung penyebaran informasi dan pengelolaan komunikasi publik Kementerian Kesehatan.

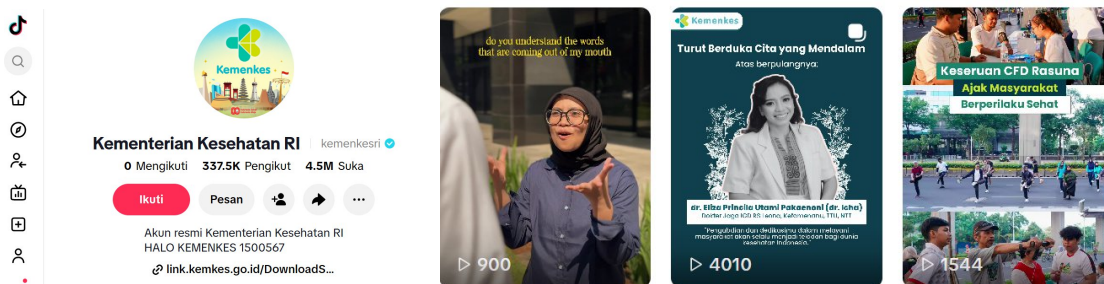
Gambar 3.X Akun Twitter Kemenkes RI



d) TikTok

Akun TikTok @kemenkesri merupakan salah satu kanal media sosial resmi Kementerian Kesehatan yang dimanfaatkan untuk menjangkau generasi Z dan generasi Alpha melalui penyampaian informasi kesehatan dalam format video pendek. Konten yang dipublikasikan dikemas secara kreatif, ringan, dan mengikuti tren media sosial, tanpa mengurangi akurasi substansi informasi, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik bagi kelompok sasaran. Melalui pemanfaatan platform TikTok, Kementerian Kesehatan berupaya memperluas jangkauan komunikasi publik, meningkatkan literasi kesehatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan yang kredibel. Hingga akhir Juni 2026, akun @kemenkesri telah memiliki lebih dari 337 ribu pengikut, yang menunjukkan tingginya potensi platform ini sebagai media diseminasi informasi kesehatan kepada generasi muda.

Gambar 3.X Konten di TikTok Kemenkes RI



e) WhatsApp Channel

WhatsApp Channel Kementerian Kesehatan RI merupakan salah satu kanal komunikasi publik yang dibentuk pada 12 September 2023 untuk memperluas diseminasi informasi kesehatan kepada masyarakat melalui platform WhatsApp. Berbeda dengan media sosial lainnya, WhatsApp Channel merupakan saluran komunikasi satu arah yang memungkinkan pengikut menerima informasi secara langsung tanpa fitur komentar, namun tetap dapat memberikan reaksi terhadap setiap konten yang dipublikasikan. Kanal ini dimanfaatkan untuk

menyebarkan informasi mengenai program, kebijakan, edukasi, dan publikasi kegiatan Kementerian Kesehatan secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hingga akhir Juni 2026, WhatsApp Channel Kementerian Kesehatan RI telah memiliki 1.864.237 pengikut, yang menunjukkan tingginya jangkauan kanal ini sebagai salah satu media komunikasi digital Kementerian Kesehatan.

Gambar 3.X Konten di WhatsApp Channel Kemenkes RI



f) Snack Video

SnackVideo merupakan salah satu kanal media sosial resmi Kementerian Kesehatan yang mulai dikelola sejak Maret 2025 sebagai upaya memperluas jangkauan komunikasi publik kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berbasis komunitas. Konten yang dipublikasikan dikemas dalam format video pendek dengan penyampaian yang ringan, menarik, dan mengikuti karakteristik pengguna platform, tanpa mengurangi substansi informasi kesehatan yang disampaikan. Melalui pemanfaatan SnackVideo, Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan jangkauan diseminasi informasi kesehatan kepada segmen masyarakat yang lebih luas melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan preferensi audiens. Hingga akhir Juni 2026, akun @kemenkesri di platform SnackVideo telah memiliki 133,6 ribu pengikut, yang menunjukkan perkembangan positif sebagai salah satu kanal komunikasi digital Kementerian Kesehatan.

Gambar 3.X Konten di SnackVideo Kemenkes RI





Tabel 3.10 Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Media Sosial

Jenis Media Sosial	Jumlah Posting					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Instagram	223	170	177	224	164	176
Facebook	109	90	84	69	65	70
X (Twitter)	217	237	241	209	217	225
TikTok	20	21	20	20	20	11
Whatsapp Channel	36	27	420	30	32	13
SnackVideo	47	22	17	20	16	10

3. Produksi Komik Animasi

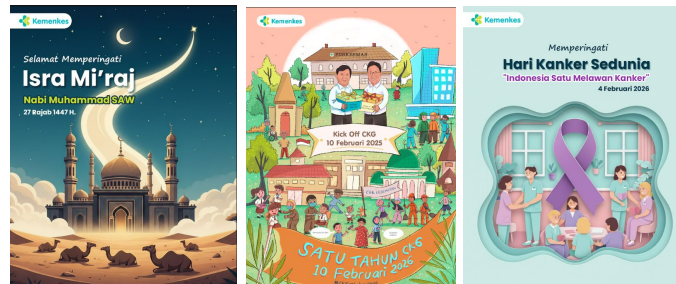
Komik animasi merupakan salah satu media komunikasi visual yang dikembangkan oleh Tim Kerja Produksi Komunikasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai inovasi dalam penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Konten ini dipublikasikan melalui berbagai akun media sosial Kementerian Kesehatan serta didistribusikan melalui *message blast* pada grup WhatsApp sebagai bagian dari upaya memperkuat diseminasi informasi dan membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Komik animasi umumnya digunakan untuk menyampaikan ucapan pada peringatan hari-hari besar nasional maupun informasi dan edukasi kesehatan yang dikemas secara kreatif, ringan, dan menarik guna menjaga serta meningkatkan *engagement* pengikut media sosial Kementerian Kesehatan. Konten disajikan dalam bentuk ilustrasi maupun animasi singkat dengan durasi kurang dari dua menit, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Berikut adalah jumlah konten ilustrasi/animasi yang diproduksi selama semester I:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Kegiatan Produksi Komik Animasi

Jenis Konten	Jumlah produksi					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni

Ilustrasi/Animasi	8	21	27	45	27	18
-------------------	---	----	----	----	----	----

Gambar 3.X Komik Animasi yang Diproduksi



4. *Live Streaming* dan *Short YouTube*

Layanan *Live Streaming* YouTube merupakan salah satu media komunikasi digital yang dimanfaatkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk menyiarkan secara langsung berbagai kegiatan strategis Kementerian Kesehatan kepada masyarakat. Layanan ini digunakan untuk mendukung publikasi dan penyebaran informasi pada kegiatan berskala nasional, seperti seminar, pertemuan, konferensi pers, peluncuran program, serta agenda strategis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan maupun unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan. Melalui *live streaming*, masyarakat dapat mengikuti jalannya kegiatan secara langsung tanpa dibatasi oleh lokasi, sehingga mendukung peningkatan transparansi, perluasan jangkauan diseminasi informasi, serta akses masyarakat terhadap informasi resmi Kementerian Kesehatan. Sepanjang Januari – Juni tahun anggaran 2026, jumlah publikasi *live streaming* dan *short youtube* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Kegiatan Produksi Komik Animasi

Jenis Konten	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Live Streaming YouTube	3	4	6	11	2	9

Gambar 3.X Live Streaming pada YouTube Kemenkes

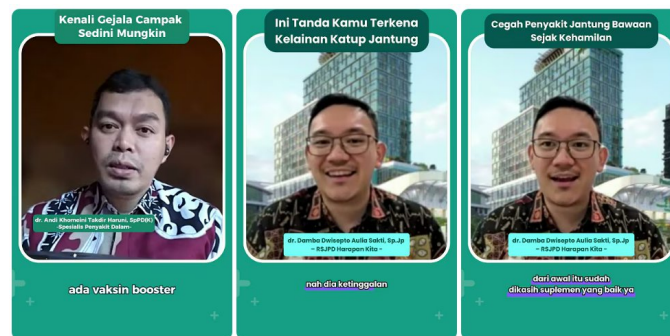


Selain itu, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga memproduksi YouTube Shorts. YouTube Shorts merupakan konten video berdurasi kurang dari 60 detik yang dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi kesehatan secara singkat, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Konten ini umumnya berisi potongan video yang memuat pesan-pesan kunci (*key messages*) dari narasumber yang kompeten terkait isu kesehatan tertentu. Materi YouTube Shorts berasal dari hasil wawancara atau diskusi pada berbagai program komunikasi publik Kementerian Kesehatan, seperti Kemencast (Kementerian Kesehatan Podcast) maupun siaran Studio Radio Kesehatan (SRK), yang kemudian dikemas kembali dalam format video vertikal berdurasi pendek. Melalui format ini, Kementerian Kesehatan berupaya memperluas jangkauan diseminasi informasi kesehatan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui penyajian konten yang sesuai dengan karakteristik media digital. Berikut adalah jumlah penayangan YouTube Shorts pada akun Kementerian Kesehatan RI selama semester I TA 2026:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja YouTube Shorts

Jenis Konten	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
YouTube Shorts	2	0	0	0	0	0

Gambar 3.X Konten YouTube Shorts yang diproduksi



5. Instagram Live Q&A

Instagram Live Q&A merupakan program siaran langsung yang diselenggarakan melalui platform Instagram sebagai media komunikasi publik yang interaktif. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara akun Instagram Kementerian Kesehatan dengan akun media sosial instansi mitra maupun akun pribadi narasumber, seperti praktisi, tenaga kesehatan, akademisi, atau *influencer* yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema yang dibahas. Melalui format siaran langsung, masyarakat dapat memperoleh informasi kesehatan secara akurat sekaligus berinteraksi secara langsung dengan narasumber melalui sesi tanya

jawab. Program ini bertujuan memperluas jangkauan diseminasi informasi kesehatan, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam memperoleh informasi kesehatan yang kredibel dan mudah dipahami. Berikut adalah Instagram *Live Q&A* yang terlaksana sepanjang Januari – Juni 2026:

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Instagram *Live Q&A*

Jenis Konten	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Instagram <i>Live Q&A</i>	0	0	0	0	0	1

Gambar 3.X Instagram *Live Q&A*



6. *Live TikTok*

TikTok Live merupakan program siaran langsung (*live streaming*) yang diselenggarakan melalui platform TikTok sebagai media komunikasi publik yang interaktif. Program ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan edukasi kesehatan secara *real-time* sekaligus memberikan ruang interaksi langsung antara narasumber atau pembawa acara dengan pengikut akun TikTok Kementerian Kesehatan. Melalui fitur ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, memberikan tanggapan, serta memperoleh informasi kesehatan secara langsung. Pelaksanaan TikTok Live bertujuan untuk meningkatkan *engagement* dengan pengikut akun @kemenkesri, memperluas jangkauan komunikasi publik, serta mendukung penyebaran informasi kesehatan yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun berikut adalah jumlah penayangan konten TikTok *Live* pada akun Kementerian Kesehatan RI:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Instagram *Live Q&A*

Jenis Konten	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
<i>Live TikTok</i>	1	5	5	6	5	0

Gambar 3.X Live TikTok



Peliputan Dan Dokumentasi

1. Peliputan Dan Dokumentasi Foto Giat Pimpinan

Dokumentasi foto kegiatan pimpinan merupakan salah satu bentuk dukungan komunikasi publik yang dilaksanakan secara berkala untuk merekam berbagai kegiatan resmi Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, maupun pimpinan Kementerian Kesehatan. Dokumentasi ini bertujuan mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kinerja instansi kepada masyarakat. Seluruh hasil dokumentasi berfungsi sebagai bukti autentik pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi bahan publikasi pada berbagai kanal media komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, publikasi digital, dan laporan kinerja, sehingga informasi mengenai program dan kegiatan Kementerian Kesehatan dapat tersampaikan secara akurat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses oleh publik.

Gambar 3.X Peliputan dan Dokumentasi Foto Giat Pimpinan



Tabel 3.15 Peliputan dan Dokumentasi Giat Pimpinan

Kegiatan	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Peliputan dan Dokumentasi Foto Giat Pimpinan	96	66	61	90	58	73

Hasil peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan didokumentasikan serta dipublikasikan melalui akun Flickr Kementerian Kesehatan RI sebagai media penyimpanan dan diseminasi dokumentasi visual kegiatan. Galeri dokumentasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui <http://flickr.com/sehatnegeriku>

2. Peliputan Dan Dokumentasi Video Giat Pimpinan

Dokumentasi video kegiatan pimpinan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kinerja Kementerian Kesehatan kepada masyarakat. Setiap dokumentasi video berfungsi sebagai bukti autentik pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi bahan publikasi pada berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan laporan kinerja. Melalui pengelolaan dokumentasi video yang sistematis, berbagai kegiatan strategis pimpinan dapat tersaji secara informatif, menarik, dan kredibel, sehingga mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat, memperkuat citra positif Kementerian Kesehatan, serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hasil dari kegiatan ini akan dipublikasikan melalui kanal YouTube Kemenkes RI.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Kegiatan Dokumentasi Video Giat Pimpinan

Kegiatan	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Peliputan dan Dokumentasi Video Giat Pimpinan	3	16	11	14	9	8

Gambar 3.X Dokumentasi Video Giat Pimpinan



3. Taping Pimpinan

Kegiatan *taping* (perekaman video) pimpinan dilaksanakan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik untuk mendukung penyampaian pesan-pesan strategis, arahan, serta informasi kelembagaan secara efektif kepada masyarakat. Produksi materi audio-visual dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kualitas penyajian agar pesan yang disampaikan tetap informatif, representatif, dan mudah dipahami. Hasil perekaman dimanfaatkan sebagai materi tayangan pada berbagai kegiatan maupun kanal komunikasi digital, termasuk pada kondisi ketika pimpinan berhalangan hadir secara langsung. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, kesinambungan penyampaian informasi, efektivitas komunikasi publik, serta perluasan jangkauan diseminasi pesan Kementerian Kesehatan dapat tetap terjaga.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Kegiatan *Taping* Pimpinan

Kegiatan	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Peliputan dan Dokumentasi Video Giat Pimpinan	8	15	10	20	10	15

4. Publikasi Rilis Kemenkes

Penyusunan dan publikasi siaran pers (*press release*) merupakan salah satu kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi resmi mengenai kebijakan, program, capaian kinerja, serta klarifikasi atas isu-isu strategis di bidang kesehatan kepada masyarakat. Siaran pers disusun berdasarkan informasi yang akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian didistribusikan kepada berbagai media massa guna memperluas jangkauan penyebarluasan informasi. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang resmi, cepat, dan kredibel mengenai kebijakan dan program kesehatan. Adapun pemberitaan yang dipublikasikan melalui website resmi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Kegiatan Publikasi Rilis Kemenkes

Kegiatan	Jumlah penayangan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Publikasi Rilis Kemenkes	46	32	21	29	23	23

Gambar 3.X Publikasi Rilis Berita melalui website resmi Kemenkes RI



Penguatan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Institusional (PEKPPP Mandiri)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan proses pengukuran yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit penyelenggara pelayanan. Pada tahun 2026, Kementerian Kesehatan melaksanakan PEKPPP secara mandiri terhadap 51 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan sebagai lokus evaluasi. Pelaksanaan PEKPPP bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan secara berkelanjutan. Melalui pelaksanaan evaluasi ini, diharapkan seluruh lokus yang dievaluasi memperoleh hasil penilaian minimal berkategori Baik, dengan peningkatan capaian menuju kategori Sangat Baik dan Pelayanan Prima sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2026, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan serangkaian kegiatan persiapan hingga Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan pedoman pelaksanaan, penguatan kapasitas pelaksana, koordinasi lintas unit, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung evaluasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Juni 2026 meliputi:

- a) 1 April 2026: Sosialisasi PEKPPP Kementerian Kesehatan Tahun 2026 kepada unit pelaksana sebagai bentuk penyamaan persepsi terhadap mekanisme dan tahapan pelaksanaan evaluasi.
- b) 20 April 2026: Pembahasan Pedoman PEKPPP Mandiri Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan evaluasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c) 11 Juni 2026: Konsolidasi Tim Verifikator PEKPPP Kementerian Kesehatan Tahun 2026 untuk menyamakan pemahaman terkait proses verifikasi dan penilaian.

- d) 14 Juni 2026: Pengajuan permohonan fasilitasi pembuatan domain kemkes.go.id kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI sebagai dukungan terhadap pelaksanaan PEKPPP secara digital.
- e) 17 Juni 2026: Pelaksanaan Bimbingan Teknis PEKPPP Mandiri Tahun 2026 guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaksana serta unit yang menjadi lokus evaluasi.

2. Forum Komunikasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah dialog dua arah antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan dalam rangka memperoleh masukan, saran, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan FKP bertujuan menyelaraskan kebijakan dan standar pelayanan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pada Tahun 2026, Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 168 Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan enam unsur pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan FKP. Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang lebih berkualitas, partisipatif, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pembelajaran Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 secara daring pada 5 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada unit pelaksana mengenai ketentuan, mekanisme, serta tata cara penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas unit kerja dalam melaksanakan FKP secara efektif dengan melibatkan seluruh unsur yang dipersyaratkan, sehingga pelaksanaan FKP di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

1. Pengelolaan Halo Kemenkes

Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan transparansi dan akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan inisiatif yang signifikan melalui akses layanan informasi publik yang diberi nama Halo Kemenkes.



Logo Halo Kemenkes

Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengembangkan Halo Kemenkes 1500567 yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan dan informasi secara cepat dan cermat yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui *hotline* 1500567.

Halo Kemenkes adalah sebuah layanan terintegrasi yang inovatif dan revolusioner, menghadirkan pengalaman pelayanan pengaduan dan informasi di bidang kesehatan yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat. Dengan memadukan berbagai kanal komunikasi seperti telepon, SMS, email, layanan ini dijalankan melalui aplikasi bernama *Ecentrix*. Pemanfaatan Halo Kemenkes tidak terbatas hanya pada masyarakat dalam negeri, melainkan juga membuka akses dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di luar negeri.

Gambar 3.X Operator Halo Kemenkes



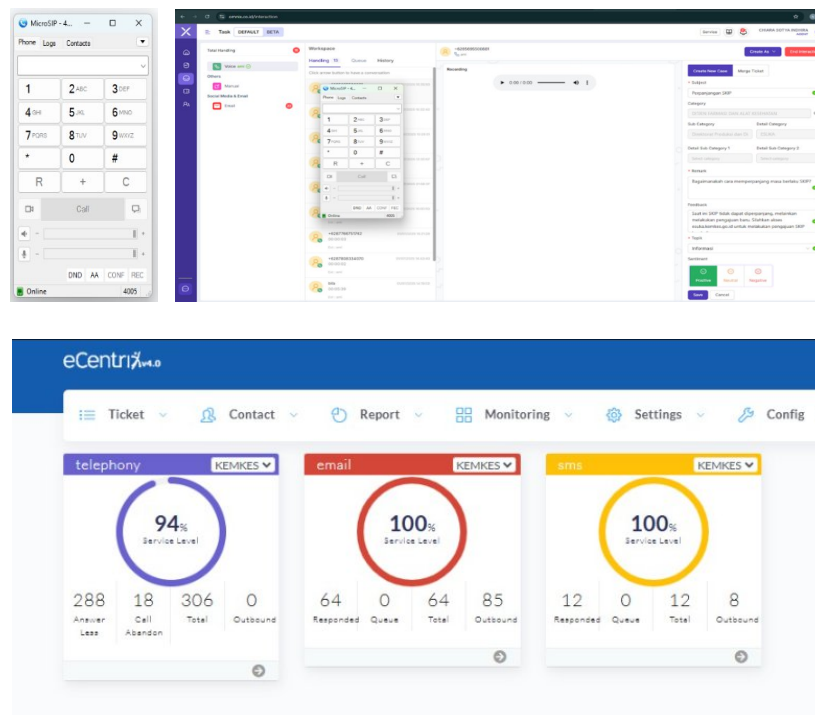
a) Layanan Telepon 1500567

Layanan Telepon 1500567 Halo Kemenkes telah menyediakan layanan yang responsif dengan waktu operasional selama 24 jam sehari. Namun, perlu diperhatikan bahwa mulai bulan Mei 2023, terdapat penyesuaian jadwal layanan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Saat ini, Halo Kemenkes beroperasi pada hari Senin hingga Kamis dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB sedangkan pada hari Jumat layanan beroperasi pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi tim Halo Kemenkes untuk

menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan layanan demi kepuasan pengguna yang lebih baik. Jumlah telepon yang dilayani dalam periode Januari hingga Juni 2026 adalah sebanyak 17.966 layanan dengan status closed. Per 19 Juni 2025 Halo Kemenkes menggunakan aplikasi omnichannel untuk layanan telepon bernama OMNIX dari vendor Infomedia, dengan tetap menggunakan aplikasi Microsip sebagai aplikasi telephony.

Dashboard pemantauan tingkat layanan (*service level*) dalam aplikasi Ecentrix aktif digunakan untuk memonitor tingkat layanan khususnya untuk layanan telepon. Hal ini memungkinkan petugas untuk menjaga tingkat layanan tetap di atas 90%.

Gambar 3.X Aplikasi *Telephony Microsip* dan Dashboard Omnix Halo Kemenkes



b) Layanan *Short Messaging Service (081281562620)*

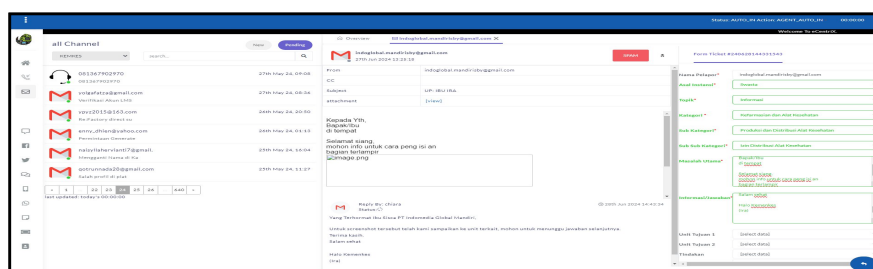
Pada tahun 2026, layanan Short Messaging Service (SMS) melalui Halo Kemenkes tetap menjadi salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam bidang kesehatan. Data menunjukkan selama periode Januari – Juni 2026 bahwa terdapat sebanyak 280 permintaan informasi yang telah berhasil ditangani melalui SMS, dengan status layanan yang ditutup (*closed*). Jumlah permintaan yang signifikan ini juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan SMS dalam menyediakan jawaban yang tepat terkait isu-isu kesehatan.

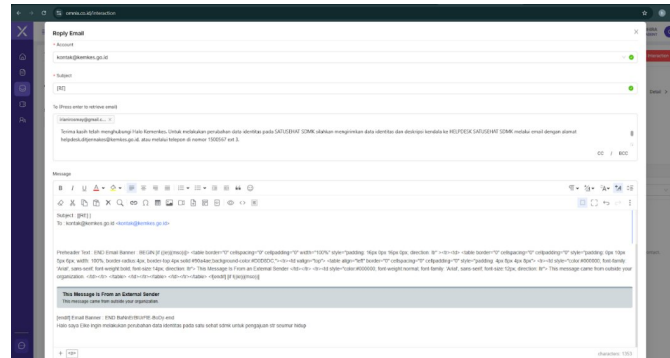
c) Layanan Email (kontak@kemkes.go.id)

Email merupakan salah satu layanan yang telah diintegrasikan dalam aplikasi Ecentrix. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2026 telah dilakukan pelayanan sebanyak 12.706 email dengan permintaan informasi sebanyak 12.615 layanan, pengaduan sebanyak 91 layanan dan saran sebanyak 0 layanan dari masyarakat dengan status *closed*. Pemanfaatan email sebagai sarana komunikasi mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks kesehatan. Jumlah email yang signifikan mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan melalui kanal ini.

Per 19 Juni 2025 Halo Kemenkes juga menggunakan aplikasi omnichannel untuk layanan email bernama OMNIX dari vendor Infomedia. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Halo Kemenkes, telah dilakukan survei kepuasan masyarakat sejak awal Januari hingga 30 Juni 2026. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terhadap pelanggan Halo Kemenkes yang menggunakan layanan kanal telepon dan surat elektronik. Saat ini kuesioner telah diisi oleh 216 responden yang merupakan pengguna layanan. SKM ini dilakukan dengan metode kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan yang terdiri dari 9 unsur SKM yang relevan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Halo Kemenkes tahun 2026. Pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan menyertakan tautan s.kemkes.go.id/SKMHK2026. Berdasarkan hasil rata-rata perunsur maka dapat disimpulkan jika nilai konversi indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,43 yang menunjukkan kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Halo Kemenkes masuk pada kategori Sangat Baik.

Gambar 3.X Tampilan Dashboard *Ecentrix* untuk *Service level Monitoring*





Secara keseluruhan, capaian penyelenggaraan layanan Halo Kemenkes pada Semester I Tahun 2026 berdasarkan tiga platform layanan yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Kegiatan Layanan Halo Kemenkes

Jenis Kanal	Jumlah layanan Halo Kemenkes					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Telepon	3.695	3.253	2.325	3.131	2.441	3.121
E-Mail	1.482	1.640	2.219	3.097	2.019	2.249
SMS	89	72	78	50	0	0

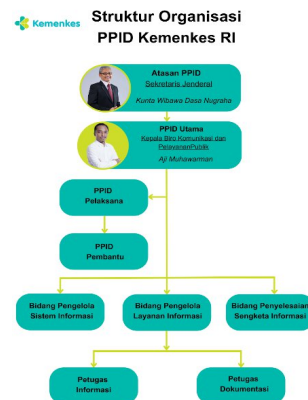
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan Koordinasi PPID

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak atas informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraannya, Petugas Layanan Informasi melaksanakan pelayanan permohonan informasi publik, pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan, serta penyusunan pertimbangan tertulis atas informasi yang dikecualikan maupun permohonan informasi yang ditolak. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan, PPID Kementerian Kesehatan memanfaatkan teknologi informasi melalui pengelolaan website PPID Kementerian Kesehatan yang telah beroperasi sejak tahun 2011 dan terus dikembangkan sebagai sarana pelayanan informasi publik bagi masyarakat, sekaligus mendukung pengelolaan layanan informasi pada seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan..

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, serta bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1991/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik. Struktur kelembagaan PPID Kementerian Kesehatan terdiri atas PPID Utama, PPID Pelaksana, PPID Pembantu, Koordinator Pelayanan Informasi, Koordinator Dokumentasi, dan Petugas Layanan Informasi, dengan Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID.

Gambar 3.X Struktur Organisasi PPID



Pelayanan informasi publik oleh PPID Kementerian Kesehatan diselenggarakan melalui berbagai kanal layanan untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Kanal layanan tersebut meliputi layanan tatap muka melalui Pojok Informasi (*Pojok Info*), layanan surat elektronik (*e-mail*), website PPID Kementerian Kesehatan, media sosial Instagram, serta layanan melalui surat resmi dengan capaian dari masing-masing kanal sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan PPID

Jenis Kanal	Jumlah layanan Pengelolaan PPID					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Pojok Info (langsung)	3	2	5	4	7	13
E-mail	4	2	4	2	0	0
Website	9	9	4	8	14	13
Instagram	9	2	2	8	6	3
Surat	2	1	0	0	0	0

3. Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)

Pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, responsif, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), Kementerian Kesehatan mengintegrasikan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! yang melibatkan pengelola pada seluruh unit kerja untuk menerima, mengoordinasikan, menindaklanjuti, dan memastikan penyelesaian pengaduan sesuai standar pelayanan.

SP4N-LAPOR! merupakan sistem pengelolaan pengaduan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan dukungan pengawasan oleh Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia, serta telah diimplementasikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan penyelenggara pelayanan publik di Indonesia.

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Kegiatan SP4N-LAPOR

Jenis Kanal	Jumlah layanan SP4N-LAPOR					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Layanan Informasi	1	54	9	3	22	59
Aspirasi	2	0	0	0	1	8
Pengaduan	52	50	37	162	53	79

4. Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan

Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan implementasi dari Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 509/MENKES/SK/2010 pada tanggal 26 April 2010. Unit ini terletak di gedung Prof. Dr. Sujudi lantai 1. Kementerian Kesehatan RI membangun Unit Layanan Terpadu (ULT) bertujuan untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan terhadap berbagai bentuk pelayanan publik, dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang paripurna, cepat dan tepat serta transparan dengan Motto ULT: Senyum, Sapa, Salam, Tepat Waktu.

ULT yang merupakan sarana prasarana untuk melakukan konsultasi terkait perizinan di bidang kesehatan berada di bawah naungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang bekerja sama dengan beberapa unit teknis sebagai pelaksana perizinan. Layanan konsultasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan informasi, pendampingan, dan penjelasan kepada pelaku usaha maupun masyarakat terkait perizinan dan regulasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Layanan ini meliputi konsultasi perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF), bahan obat, kosmetik, obat tradisional, serta persetujuan ekspor dan impor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), surat keterangan dan izin edar alat kesehatan serta Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), izin distribusi alat kesehatan, sertifikasi CPAKB dan CDAKB, konsultasi registrasi alat kesehatan berdasarkan kelas risiko (AB, CD, dan *In Vitro Diagnostic*), konsultasi PKRT, KFA Alat Kesehatan, serta konsultasi produk dalam negeri. Melalui layanan konsultasi ini diharapkan proses perizinan dan pemenuhan persyaratan regulasi dapat berjalan secara lebih efektif, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), maka seluruh layanan perizinan telah dilakukan secara online melalui sistem OSS. Dengan demikian maka unit ULT yang sebelumnya melayani perizinan dan pemberkasan secara tatap muka saat ini hanya melakukan layanan konsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses perizinan.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT)

Jenis Kanal	Jumlah layanan ULT					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Layanan ULT	1.167	1.128	924	1.051	923	883

Hubungan Media dan Kelembagaan

1. Kunjungan Kerja Spesifik

Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan juga mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan. kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Komisi IX dalam masa sidang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan peraturan di bidang yang menjadi ruang lingkup Komisi IX. Kunjungan Kerja Spesifik berfokus pada isu atau permasalahan tertentu yang sedang menjadi perhatian. Tujuan kunjungan kerja spesifik antara lain:

- Mengumpulkan data dan informasi langsung dari daerah.
- Mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan mitra kerja Komisi IX.
- Menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.

Gambar 3.X Kunjungan Kerja Spesifik dengan Mitra Kemenkes RI



Tabel 3.23 Capaian Kinerja Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Dalam rangka Peninjauan Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana, di Kota Padang Sumatera Barat tanggal 28 sd 29 Januari 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Dalam rangka Peninjauan Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana, di Padang Pariaman Sumatera Barat Tanggal 28 sd 29 Januari 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Dalam rangka Peninjauan Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana, di Langkat Sumatera Utara 29 sd 30 Januari 2026
2.	Februari	-
3.	Maret	- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 10 dan 11 Maret 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 10 dan 11 Maret 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 10 dan 11 Maret 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta tanggal 29 s.d 31 Maret 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 s.d 31 Maret 2026

4.	April	-
5.	Mei	- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengawasan Penanganan Tuberkulosis (TB) dan HIV tanggal 21 s.d. 23 Mei 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan ke Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pengawasan Penanganan Tuberkulosis (TB) dan HIV tanggal 21 s.d. 23 Mei 2026 - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan ke Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pengawasan Penanganan Tuberkulosis (TB) dan HIV tanggal 21 s.d. 23 Mei 2026
6.	Juni	-

2. Kunjungan Kerja Reses

Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan koordinasi dan pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI serta kunjungan kerja pimpinan sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan kesehatan. Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah, kondisi pelayanan kesehatan di daerah, serta berbagai isu strategis yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI. Melalui kegiatan ini, Kementerian Kesehatan memfasilitasi koordinasi, penyediaan informasi, dan pendampingan selama pelaksanaan kunjungan kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memperkuat sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan DPR RI dalam mendukung pembangunan kesehatan:

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Kegiatan Kunjungan Kerja Reses

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	-
2.	Februari	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 sd

		20 Februari 2026 • Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan 19 sd 21 Februari 2026 • Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Jambi Provinsi Jambi 23 sd 24 Februari 2026
3.	Maret	-
4.	April	• Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 22 dan 24 April 2026 • Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tanggal 22 dan 24 April 2026 • Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara tanggal 22 dan 24 April 2026
5.	Mei	-
6.	Juni	-

3. Rapat Kerja dengan Mitra Kementerian Kesehatan

Salah Salah satu tugas Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan adalah penyiapan dan pendampingan dalam Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dan acara kelembagaan lainnya. Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan bertugas koordinasi penyiapan agenda, koordinasi penyiapan raker, menyiapkan pendampingan, menggandakan bahan, hingga penyiapan jalannya rapat kerja. Rapat Kerja Komisi IX DPR RI adalah forum rapat resmi antara Komisi IX DPR RI dengan kementerian/lembaga mitra kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk membahas kebijakan, program, kinerja, serta isu-isu strategis di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial.

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Kegiatan Rapat Kerja dengan Mitra Kementerian Kesehatan

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	-

2.	Februari	• Rapat Kerja Pimpinan DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI tanggal 9 Februari 2026 pembahasan terkait Perbaikan ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi • Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Kementerian kesehatan tanggal 18 Februari 2026 Pembahasan: Koordinasi dan evaluasi percepatan pemulihan pasca bencana
3.	Maret	Rapat Kerja Pimpinan DPR RI dengan Kementerian Kesehatan tanggal 9 Maret 2026 Pembahasan terkait dengan Anggaran RS 3 Berlian
4.	April	• Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Kesehatan tanggal 13 April 2026 Pembahasan: Inventarisasi materi Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permasalahan terkait honorer tenaga kesehatan di Daerah dan terkait bidang kesehatan lainnya • Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan tanggal 15 April 2026 Pembahasan: Penjelasan terkait kecukupan kuota PBI dan ketepatan sasaran berdasarkan integrasi DTSEN, penanganan peserta JKN yang di nonaktifkan serta mekanisme masa transisi pelayanan kesehatan bagi peserta terdampak serta penjelasan terkait penguatan system kepesertaan JKN melalui integrasi data mekanisme reaktifasi kepesertaan. • Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan tanggal 20 April 2026 Pembahasan: Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak dan penyakit menular lainnya, evaluasi pelaksanaan program imunisasi nasional, progres pemulihan pelayanan kesehatan di Aceh dan Sumatra serta strategi penanganan penyakit KJSU

5.	Mei	- Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juni 2026 Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 8 Juni 2026 Pembahasan: Permasalahan ribuan calon dokter yang terancam drop out akibat kendala akademik, pembiayaan dan sistem pendidikan kedokteran, evaluasi kasus kematian dokter internship, termasuk aspek keselamatan kerja, beban kerja, pengawasan program internship termasuk Retaker, serta ketidakpastian penerbitan SERPENG pendidikan spesialis kedokteran keluarga layanan primer serta sinkronisasi kebijakan pendidikan kedokteran dan penguatan layanan primer nasional. - Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 9 Juni 2026 Pembahasan: Strategi keberlangsungan program JKN dan arah transformasi JKN kedepan, termasuk rancangan penyesuaian iuran dan tarif pelayanan kesehatan JKN, Penyelesaian pending klaim dan perbaikan tata kelola pembayaran, Peningkatan kualitas layanan peserta JKN, termasuk akses layanan, notifikasi kepesertaan, layanan promotif-preventif, serta peningkatan akses dan perlindungan peserta di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) - Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 11 Juni 2026, membahas terkait Pembahasan RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2027 - Rapat Kerja Panja Kebijakan Belanja Penerimaan Pusat dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes tanggal 22 Juni 2026 pembahasan Pembahasan Kebijakan BPP dalam rangka pembicaraan pendahuluan KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027
----	-----	---

		- Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 23 Juni 2026 Pembahasan: Evaluasi capaian cakupan imunisasi nasional dan daerah, termasuk pelaksanaan imunisasi rutin dan kejar imunisasi pada kelompok rentan (vaksinasi rabies), strategi peningkatan cakupan vaksinasi melalui penguatan edukasi masyarakat, penanganan <i>Vaccine Hesitancy</i>, dan optimalisasi peran Pemerintah Daerah serta fasilitas pelayanan Kesehatan serta Evaluasi kesiapan Distribusi vaksin dan sistem rantai dingin (cold chain), khususnya di wilayah 3T, serta roadmap penguatan program imunisasi nasional ke depan - Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI tanggal 25 Juni 2026, Pembahasan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
6.	Juni	-

Gambar 3.X Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI



4. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Selain melaksanakan pendampingan Rapat Kerja (Raker), Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga melakukan koordinasi dan pendampingan pada pelaksanaan Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. RDP merupakan rapat resmi antara Komisi IX DPR RI dengan pejabat pemerintah atau pejabat setingkat Eselon I dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan, membahas berbagai permasalahan, melaksanakan fungsi pengawasan, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik mendukung kelancaran penyelenggaraan RDP melalui koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan teknis, sehingga proses penyampaian informasi dan pembahasan substansi antara Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI dapat berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang semester I TA 2026, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Kegiatan Rapat Dengar Pendapat

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	-
2.	Februari	Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI tanggal 11 Februari 2026 Pembahasan: Penjelasan Tentang Tindak Lanjut Penghapusan Tunggakan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang Non-Aktif dan Terbukti Tidak Mampu, Baik Dari Sisi Regulasi Maupun Petunjuk Teknis, Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Kajian DJSN Mengenai Penyesuaian Besaran Iuran JKN serta Pelaporan Pelaksanaan Program JKN Tahun 2025, Termasuk Penggunaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Jenderal tanggal 23 Juni 2026 Pembahasan: Pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

		K/L dalam RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Harmonisasi kewenangan, standar mutu, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional.
--	--	---

5. Temu Media

Temu media atau jumpa pers merupakan kegiatan komunikasi publik yang bertujuan menyebarluaskan informasi program kesehatan, memberikan edukasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan yang bertanggung jawab mengundang media, narasumber, dan menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan. Materi yang disampaikan mencakup program kesehatan maupun isu kesehatan terkini yang memerlukan informasi yang akurat. Untuk memastikan kredibilitas informasi, narasumber yang dihadirkan merupakan pejabat atau pakar yang kompeten, baik dari Kementerian Kesehatan maupun kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tema yang dibahas. Adapun berikut merupakan rekapitulasi pelaksanaan temu media selama semester I TA 2026:

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Kegiatan Temu Media

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	- Konferensi Pers <i>update</i> penanganan bencana Sumatra tanggal 7 Januari 2026 - Konferensi Pers <i>update</i> pembangunan rumah bagi nakes named terdampak bencana Sumatra tanggal 12 Januari 2026 <i>Talkshow</i> Menteri Kesehatan dengan Yohei Sasakawa Tanggal 15 Januari 2026 - Konferensi Pers <i>update</i> 1 Tahun CKG tanggal 23 Januari 2026 - Konferensi Pers terkait operasi jantung terbuka di RS KEI Surakarta 29 Januari 2026
2.	Februari	- Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait <i>update</i> RS PHTC 5 Februari 2026 - Konferensi Pers Wakil Menteri Kesehatan I terkait Kerja sama King Salman HARC 6 Februari 2026

		• <i>Talkshow</i> terkait putusan MK ttg konsil dan kolegium 10 Februari 2026 • Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait BGSi 11 Februari 2026 • Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait Orientasi PPDS RSPPU 25 Februari 2026 • Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait Kunjungan presiden AIIB tanggal 26 Februari 2026 • Temu Media Plt. Dirjen P2 terkait <i>update</i> penanggulangan campak tanggal 26 Februari 2026
3.	Maret	• Temu Media terkait Hari Pendengaran Sedunia tanggal 2 Maret 2026 • Temu Media terkait <i>update</i> penanggulangan campak tanggal 6 Maret 2026 • Konferensi Pers terkait upaya pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa anak tanggal 9 Maret 2026 • Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait MoU Kemenkes-KPK 11 Maret 2026 • Konferensi Pers Wakil Menteri II terkait dengan Hari Kusta Sedunia tanggal 11 Maret 2026 • Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait dengan penyerahan donasi ambulans kepada daerah terdampak bencana Sumatera Tanggal 12 maret 2026 • Konferensi Pers Menteri Kesehatan terkait pelepasan mudik Bersama pegawai Kementerian Kesehatan tanggal 13 Maret 2026 • Konferensi Pers terkait perkembangan kasus campak tanggal 13 Maret 2026 • Konferensi Pers Menkes terkait peninjauan pelayanan publik di RS tanggal 16 Maret 2026 • Konferensi Pers Wamenkes 1 terkait peninjauan pos pantauan Mudik tanggal 17 Maret 2026 • Konferensi Pers <i>update</i> campak dan penjelasan terkait Program <i>Internship</i> Dokter Indonesia tanggal 30 Maret 2026

		- Konferensi Pers terkait informasi terkini terkait perkembangan kasus campak tanggal 25 Maret 2026 - Konferensi Pers Update kasus campak tanggal 30 Maret 2026 Konferensi Pers terkait Program <i>Internship</i> Dokter Indonesia tanggal 30 Maret 2026"
4.	April	- Konferensi Pers Hari TB Sedunia tanggal 6 April 2026 - Kunjungan Wamenkes 1 ke Pasien <i>Post Op</i> Transplantasi Hati tanggal 10 April 2026 - Konferensi Pers <i>Update</i> Kasus Campak & Kick-Off Imunisasi Campak Namedkes tanggal 10 April 2026 - Konferensi Pers Launching Label Nilai Gizi Produk tanggal 14 April 2026 <i>Topping Off Ceremony</i> Gedung Harapan Kita – Tokushukai tanggal 15 April 2026 - Temu Media Pekan Imunisasi Dunia 2026 tanggal 23 April 2026 - Bedah Buku Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologi tanggal 23 April 2026 - Konferensi Pers Konsorsium 1000 HPK tanggal 28 April 2026 - Konferensi Pers Hari Malaria Sedunia 2026 tanggal 30 April 2026
5.	Mei	- Konferensi Pers Puncak Hari PID 2026 tanggal 2 Mei 2026 - Konferensi Pers Hari Obesitas Sedunia 2026 tanggal 7 Mei 2026 - Konferensi Pers Hasil Investigasi Internship tanggal 7 Mei 2026 - Konferensi Pers Konferensi pers Kewaspadaan Penyakit Virus Hanta tanggal 11 Mei 2026 - Konferensi Pers MoU Kemenkes - Lippo Mall Nusantara, UPH, PT Siloam internasional Hospital, Tbk, tanggal 12 Mei 2026
6.	Juni	Konferensi Pers Hari Kesehatan Hati Indonesia

		tanggal 2 Juni 2026 • Konferensi Pers Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 tanggal 11 Juni 2026 • Konferensi Pers Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tanggal 13 Juni 2026 • Konferensi Pers ASEAN <i>Dengue Day</i> 2026 tanggal 15 Juni 2026 • Konferensi Pers Launching Komisi <i>The Lancet Regional Health Western Pacific</i> tanggal 22 Juni 2026 • Konferensi Pers Forum Tingkat Tinggi "<i>Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN : Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response</i>" tanggal 24 Juni 2026 • Konferensi Pers Serah Terima Dukungan Alat Kesehatan ke Puskesmas terdampak di Wilayah Aceh, Sumatra Utara tanggal 25 Juni 2026
--	--	---

Gambar 3.X Temu Media



6. Pertemuan, Produksi dan Penayangan Filler Talkshow Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan

Pertemuan, Produksi, dan Penayangan Filler Talkshow Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan merupakan salah satu tugas Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendukung penyebaran informasi, sosialisasi, dan edukasi program kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi koordinasi penyusunan konsep dan materi, produksi konten audiovisual berupa talkshow dan filler, serta penayangan melalui berbagai media komunikasi, baik televisi, media sosial, maupun platform digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan informasi mengenai program dan kebijakan kesehatan dapat tersampaikan secara akurat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara

luas. Berikut adalah rincian pelaksanaan sosialisasi edukasi program kesehatan yang telah terlaksana hingga Juni 2026:

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Kegiatan Pertemuan, Produksi dan Penayangan Filler Talkshow Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	-
2.	Februari	- Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Bapak Surya Utama S.I.P tanggal 2 Maret 2026 di Gedung Olahraga Bulungan, Jakarta Selatan - Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Bapak H. Obon Tabroni S.E. tanggal 13 Maret 2026 di Gedung Serbaguna Kecamatan Tambun Utara - Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Bapak Zainul Munasichin tanggal 14 Maret 2026 di Kota Sukabumi - Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Ibu Irma Suryani, SE. MM. tanggal 29 Maret 2026 di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	- Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Ibu dr. Hj. Cella Nurrachadiana, M.H.Kes tanggal 1 s.d. 3 Mei 2026 di Sekolah Alam Al Rasyid Islamic School Jl. Raya Sampalan No.9, Waluya, Kec. Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat 41358 - Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Ibu drg. Putih Sari, tanggal 6 s.d. 8 Mei 2026 di SMK IT IBNU RUSYD, Satriamekar, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510
6.	Juni	Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Dr. Ir. Heru Tjahyono, MM., tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 di Aula Gedung Prajna Paramita Kampus UINSA Kab. Tulungagung, Jawa Timur

		- Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Yahya Zaini, SH.tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 di Balai Pertemuan Kelurahan Begadung, Kab. Nganjuk, Jawa Timur - Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan oleh Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A. tanggal 25 s.d. 27 Juni 2026 di Aula Bahjatul Ulum, PP Darussalam, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
--	--	--

Gambar 3.X Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan, Produksi dan Penayangan Filler Talkshow Sosialisasi Edukasi Program Kesehatan



7. Pembinaan Wilayah

Terdapat empat kegiatan situasional yang telah melibatkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas direktif pimpinan dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, khususnya di Provinsi Bali. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan serta Tim Kerja Penguatan Pelayanan Publik, guna memastikan efektivitas komunikasi serta penguatan tata kelola pelayanan di wilayah tersebut. Pelaksanaan pembinaan wilayah sampai dengan Juni 2026 telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Wilayah

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Januari	-
2.	Februari	<i>Pre-Meeting</i> Audiensi Bupati Tabanan 25 Februari 2026
3.	Maret	Rapat Koordinasi wilayah Bali terkait Pendampingan Indikator

		(RIBK, SPM, DAK, PHTC) tanggal 11 Juni 2026
4.	April	Audiensi Bupati Tabanan dengan Menteri Kesehatan Tanggal 22 April 2026
5.	Mei	-
6.	Juni	• <i>Pre-meeting</i> audiensi Bupati Karangasem, Klungkung, dan Buleleng dengan Menkes tanggal 5 Juni 2026 • Rapat Koordinasi Pembinaan Wilayah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2026, pembahasan terkait Sosialisasi dan Konsultasi Teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, tanggal 22 Juni 2026 • Koordinasi wilayah Identifikasi kendala/masalah, Desk Implementasi CKG, tanggal 24 Juni 2026 • <i>Pre-meeting</i> audiensi Bupati Klungkung dan Buleleng dengan Wamenkes tanggal 29 Juni 2026

Komunikasi Internal

1. Pengelolaan Newsletter Digital

Dalam mendukung Transformasi Sistem Kesehatan agar tersampaikan dan terinternalisasi di lingkungan internal Kementerian Kesehatan, telah disusun inisiatif program *Internal Transformation Office* melalui kegiatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal (Diforkin).

Terdapat 10 kegiatan di dalam Diforkin. Biro Komunikasi dan Informasi Publik turut terlibat dalam 3 kegiatan, di antaranya melalui: 1) *newsletter* yang akan disebarluaskan melalui *email blast*, *e-office* dan *WA blast*; 2) kegiatan dengan para pengelola komunikasi internal di masing-masing satker; serta 3) mengoptimalkan pemanfaatan media yang saat ini sudah tersedia. Newsletter Digital dikeluarkan dalam bentuk WA Blast sementara diseminasinya menggunakan media yang telah ada, seperti Instagram @lifeatkemenkes dan portal E-Office.

a. Shared Media: Instagram @lifeatkemenkes

Instagram merupakan media sosial ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah Youtube dan Facebook. Instagram dipilih karena terlebih dahulu Biro OSDM telah memiliki instagram yang sudah memiliki 12 ribu *followers*. Selanjutnya akun *existing* ini disepakati untuk digunakan sebagai media sosial penyampai pesan kepada pegawai Kemenkes. Sampai dengan Juni 2026 jumlah *follower* sebanyak 137 ribu *followers*.

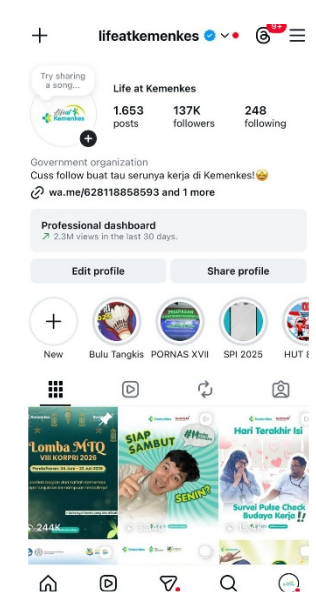
Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan pengelolaan dan publikasi konten budaya kerja Kemenkes pada akun Instagram @lifeatkemenkes sebagai media komunikasi internal Kementerian Kesehatan. Kegiatan meliputi perencanaan, penyusunan naskah, pembuatan konten, koordinasi, hingga publikasi informasi yang bertujuan meningkatkan *engagement* pegawai, memperkuat budaya kerja, serta mendukung penyebaran informasi internal secara kreatif dan informatif.

Sementara untuk strategi *content pillar* dan *agenda setting* didiskusikan bersama tim Diforkin. Pada periode Januari s/d Juni 2026 tim diforkin telah memposting sebanyak lebih dari 45 konten digital (*Graphic* dan *Video*).

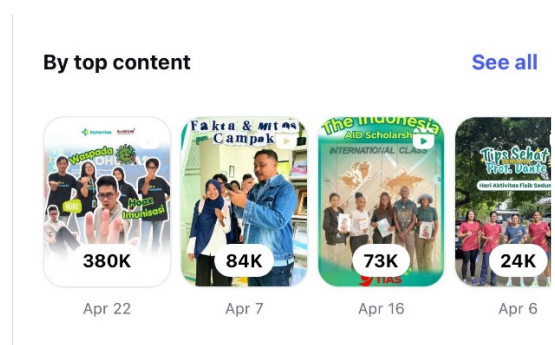
Konten pilar dalam akun @lifeatkemenkes dibuat beragam, diantaranya:

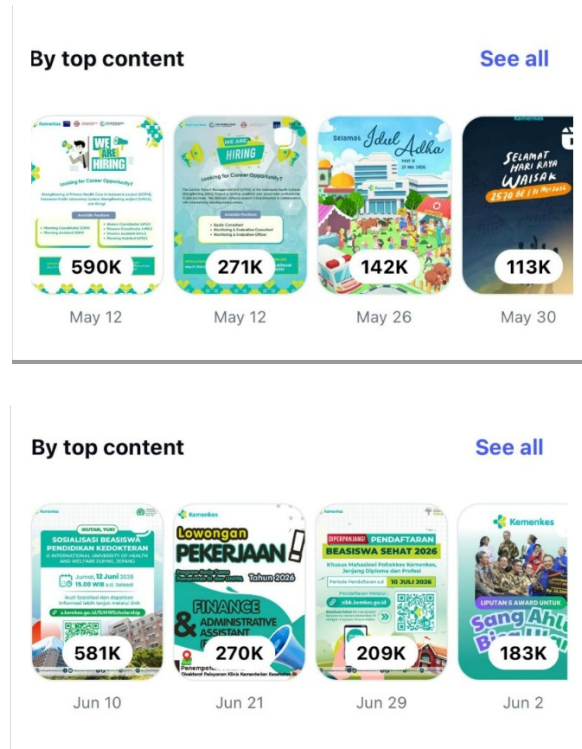
- 1) Informasi umum kegiatan internal pegawai, ex: Townhall, Kegiatan Ramadhan, Mutasi Internal, dll.
- 2) Informasi pengembangan kompetensi pegawai, ex: beasiswa, pelatihan, seminar, dsb

- 3) Informasi Kepegawaian, ex: rekrutmen pegawai
- 4) *Monday motivation*
- 5) Komik transformasi dan Ber-AKHLAK
- 6) EXIST: Hobi dan Komunitas Pegawai Kemenkes
- 7) CAPSAY: cuap cuap santai seputar jabatan fungsional maupun bincang-bincang bersama pegawai Kemenkes terkait pengalaman maupun informasi bermanfaat lainnya
- 8) Ucapan selamat hari besar
- 9) Konten kolaborasi bersama unit lain atau UPT



Beberapa Konten yang banyak mendapatkan *reach* dan *impression* yang cukup tinggi:





2. Pertemuan Komunikasi Internal dan Kehumasan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki peran krusial dalam membangun koordinasi yang solid, baik di jajaran internal Kementerian Kesehatan maupun dengan lembaga lainnya. Sebagai wadah diseminasi kebijakan, pertemuan Bakohumas menjadi sarana strategis untuk meningkatkan peran serta dan kontribusi lintas sektor dalam menyukseskan program-program Kementerian Kesehatan, utamanya dalam mendukung Asta Cita Presiden RI di bidang kesehatan yang membutuhkan kolaborasi luas. Tantangan nyata saat ini muncul pada program imunisasi *Zero-Dose* yang menjadi prioritas nasional guna menurunkan angka kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Selain kendala teknis, program ini menghadapi hambatan komunikasi yang kompleks, mulai dari rendahnya literasi kesehatan hingga maraknya misinformasi, disinformasi, serta hoaks terkait keamanan dan kehalalan vaksin yang memicu keraguan masyarakat dan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam konteks tersebut, peran Bakohumas menjadi sangat strategis untuk menyamakan persepsi, membangun narasi tunggal, serta mengamplifikasi informasi positif secara masif dan terkoordinasi. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya” pada Selasa, 21 April 2026, bertempat di Auditorium dr. Herman Susilo, MPH, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mempertemukan lebih dari 200 peserta, yang terdiri dari

perwakilan Kementerian/Lembaga, humas di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta pakar kesehatan untuk berkolaborasi melalui metode *talkshow*, pemaparan materi, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, hingga aksi amplifikasi konten serentak di media sosial.

Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa isu strategis, antara lain:

- a. Tantangan Imunisasi nasional belum sepenuhnya tercapai, dengan catatan sekitar 2,3 juta anak masih belum mendapatkan imunisasi. Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan tingginya keraguan masyarakat akibat maraknya hoaks dan disinformasi.
- b. Peran strategis humas dalam membangun kepercayaan publik menuntut penyampaian pesan yang sederhana, emosional, dan mudah dipahami. Selain itu, pola komunikasi perlu beralih dari pendekatan satu arah menjadi lebih interaktif.
- c. Strategi komunikasi yang digunakan dengan melakukan penyusunan narasi tunggal, penyebaran informasi secara masif dan serentak di berbagai *platform*. Respon cepat terhadap hoaks dengan pendekatan empatik, dan fokus pada kelompok masyarakat netral, bukan hanya pendukung.
- d. Pemanfaatan media digital, penyesuaian konten berdasarkan platform (Instagram, TikTok, X, Facebook), pendekatan *storytelling* untuk menyentuh aspek emosional masyarakat, serta berkolaborasi dengan *influencer* sebagai mitra komunikasi.
- e. Penguatan kolaborasi bersinergi antar Kementerian/Lembaga, bekerja sama dengan PKK, Poltekkes, dan komunitas, serta memberikan edukasi dan pelibatan *influencer* kesehatan.

3. Pengembangan Program *Employee Advocacy* Kemenkes

Dalam upaya menghadapi tantangan disinformasi kesehatan dan rendahnya cakupan imunisasi nasional, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan kegiatan pengembangan program *Employee Advocacy* Kementerian Kesehatan sebagai upaya mendorong partisipasi aktif pegawai dalam menyebarluaskan informasi dan program prioritas Kementerian Kesehatan.

Selain itu, untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat secara luas, Kementerian Kesehatan secara rutin mempublikasikan berbagai konten melalui kanal media sosial resmi, yaitu:

- a. Facebook: @kemenkes_ri
- b. X: @KemenkesRI
- c. Instagram: @kemenkes_ri; @lifeatkemenkes
- d. YouTube: @KementerianKesehatan RI
- e. TikTok: @kemenkesri; @ayosehat.kemkes

Sinergi antara diseminasi konten melalui kanal resmi tersebut dengan program *Employee Advocacy* merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan digital Kementerian Kesehatan dengan mengoptimalkan peran ASN sebagai duta informasi yang kredibel di media sosial.

Sebagai bentuk implementasi awal dalam membangun infrastruktur sumber daya manusia yang mumpuni, telah diselenggarakan serangkaian kegiatan pembekalan dan sosialisasi, antara lain:

- a) **Kegiatan Pergerakan *Cybertroops* Kemenkes untuk Merancang *Employee Advocacy* dalam Mendukung Program Imunisasi di Indonesia:** Dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Mei 2026 di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 pegawai Kemenkes. Pembekalan teknis yang diberikan meliputi penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk produksi konten kreatif, teknik *storytelling* yang emosional, serta manajemen respon cepat terhadap disinformasi kesehatan, dengan menghadirkan narasumber dari lintas instansi dan pakar media sosial.
- b) **Kegiatan Sosialisasi Strategi Pembinaan Kehumasan Berbasis *Employee Advocacy* (EA) di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Ditjen SDMK):** Dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026 bertempat di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen SDMK), Gedung dr. Suwardjono Surjaningrat (Hang Jebat), Jakarta Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman serta menggalang dukungan implementasi strategi kehumasan partisipatif di seluruh unit kerja Kementerian Kesehatan.
- c) **Kegiatan Sosialisasi Strategi Pembinaan Kehumasan Berbasis *Employee Advocacy* (EA) di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BKPK):** Dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 bertempat di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Percetakan Negara. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan pemerataan pemahaman terkait peran advokasi pegawai di berbagai unit kerja Kemenkes.

Program ini telah diuji coba melalui tiga fase amplifikasi konten selama periode April-Mei 2026, yang mencakup respon terhadap isu duka cita, konten *Live* Menteri Kesehatan, hingga penanganan isu *Hantavirus*. Secara akumulatif, uji coba ini berhasil mencatatkan 407 aksi amplifikasi oleh pegawai, yang membuktikan potensi besar keterlibatan ASN dalam memperluas jangkauan informasi resmi kementerian di ruang digital, termasuk konten yang dipublikasikan dari akun media sosial resmi Kemenkes. Saat ini, program

telah menghimpun 153 peserta aktif, yang terdiri dari 66 pegawai unit utama dan 87 pegawai UPT Vertikal.



4. Webinar *Public Relation Series*

Komunikasi publik saat ini telah mengalami disrupsi besar akibat digitalisasi dan masifnya penggunaan media sosial. Dalam era di mana setiap individu dapat menjadi agen penyebar informasi (*citizen journalism*), arus opini publik bergerak sangat cepat dan seringkali tidak terprediksi. Kondisi ini membuat instansi publik menjadi jauh lebih rentan terhadap krisis komunikasi, di mana sebuah sentimen negatif berskala kecil dapat bereskalasi menjadi krisis reputasi berskala nasional dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Menghadapi dinamika tersebut, paradigma *Public Relations (PR)* tradisional yang mengandalkan pendekatan reaktif tidak lagi memadai. Praktisi humas modern di lingkungan Kementerian Kesehatan dituntut untuk bertransformasi menuju pendekatan yang proaktif dan berbasis bukti (*data-driven*). Menjawab kebutuhan transformasi tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan kegiatan Webinar PR Series sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang komunikasi dan kehumasan. Kegiatan ini dirancang secara berkesinambungan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik terkait isu-isu komunikasi publik, kehumasan, media digital, serta strategi komunikasi yang relevan dengan perkembangan dan tantangan terkini.

Sepanjang Semester I tahun 2026, realisasi pelaksanaan program Webinar PR Series telah mencapai tiga kali penyelenggaraan dengan mengangkat tema-tema strategis yang disesuaikan dengan eskalasi isu kesehatan dan kebutuhan tata kelola komunikasi internal. Seri perdana diselenggarakan pada 27 Februari 2026 secara daring dengan menghimpun 548 peserta, yang secara khusus mengangkat tema "Pemanfaatan Big Data Digital untuk Mengatasi Komunikasi Krisis". Fokus utamanya adalah membekali peserta dengan wawasan komprehensif mengenai integrasi teknologi analitik data ke dalam strategi

komunikasi krisis, mulai dari tahap prakrisis, penanganan saat krisis, hingga pascakrisis atau pemulihan reputasi.

Langkah penguatan kompetensi ini kemudian dilanjutkan dengan seri kedua pada 2 April 2026 yang diikuti oleh 600 peserta secara daring. Membawa tema "Bukan Sekadar Klarifikasi: Strategi Cerdas Menguasai Opini Publik Lawan Misinformasi-Disinformasi", kegiatan ini bertujuan memperkuat strategi komunikasi proaktif dan terukur sehingga humas tidak hanya sekadar memberikan klarifikasi, namun mampu menguasai narasi publik secara efektif di tengah maraknya hoaks kesehatan.

Selanjutnya, seri ketiga dilaksanakan pada 18 Juni 2026 dengan partisipasi 527 peserta daring, berfokus pada "Pengelolaan Komunikasi Internal dan Kehumasan". Sesi ini ditujukan untuk meningkatkan soliditas birokrasi, penyelarasan arus informasi di internal organisasi, dan optimalisasi peran pegawai dalam mendukung diseminasi kebijakan Kementerian Kesehatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Webinar PR Series pada awal tahun 2026 ini berhasil menghimpun partisipasi aktif dan memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi peserta yang terdiri dari jajaran kehumasan, aparat sipil negara, serta perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencapaian ini berkontribusi langsung pada target peningkatan kompetensi sumber daya manusia birokrasi, yang ditandai dengan terciptanya standardisasi pemahaman yang merata mengenai prinsip-prinsip kehumasan modern dan manajemen krisis berbasis data di seluruh unit kerja.



5. Survei Kepuasan *Followers* kemenkes

Sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan informasi publik di ranah digital, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan Survei Kepuasan *Followers* Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan audiens terhadap pengelolaan kanal media sosial resmi kementerian, yang pelaksanaannya meliputi penyusunan instrumen survei, pengumpulan dan pengolahan

data, hingga analisis hasil sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi ini menjadi landasan strategis dalam meningkatkan kualitas konten, mengoptimalkan pelayanan informasi, serta memperkuat efektivitas komunikasi digital instansi. Pelaksanaan survei diselenggarakan secara mandiri pada tanggal 4 April hingga 11 Mei 2026 melalui penyebaran kuesioner yang difokuskan pada akun Instagram @lifeatkemenkes.

Survei tahun ini berhasil menghimpun partisipasi dari 281 responden yang tersebar secara merata di tingkat nasional, mencakup perwakilan wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Profil audiens menunjukkan dominasi yang kuat dari kelompok generasi Z dan milenial pada rentang usia 21 hingga 40 tahun. Mayoritas responden, yakni sebesar 83,2% merupakan pegawai internal Kementerian Kesehatan, sedangkan sisanya merupakan publik umum. Dari sisi penilaian pilar konten, kanal @lifeatkemenkes terbukti berhasil memosisikan diri sebagai sumber edukasi dan referensi terpercaya yang kredibel, dibuktikan dengan perolehan skor kepuasan tertinggi pada aspek konten Bermanfaat (4.77) dan Informatif (4.70). Secara khusus, informasi terkait urusan kepegawaian menjadi daya tarik utama yang secara konsisten mendongkrak tingkat keterlibatan (*engagement*) audiens di internal kementerian.

Pengelolaan Perpustakaan

1. Bimbingan Teknis Perpustakaan

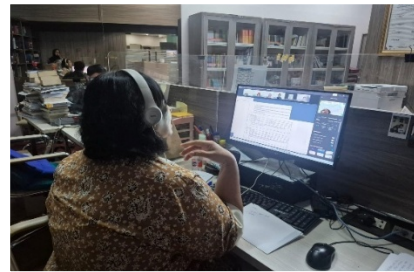
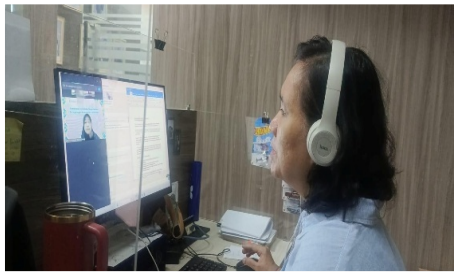
Perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk menjamin kualitas pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), diperlukan pembinaan yang berkesinambungan melalui kegiatan akreditasi, pendampingan, dan surveilans.

Mulai tahun 2026, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberlakukan instrumen akreditasi baru yang mengacu pada Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2025. Perubahan instrumen tersebut mengharuskan seluruh perpustakaan melakukan penyesuaian terhadap dokumen, bukti implementasi, serta tata kelola perpustakaan agar memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagai instansi pembina perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan berupa pendampingan akreditasi kembali perpustakaan perguruan tinggi (re-akreditasi), pembinaan surveilans bagi perpustakaan yang telah memperoleh Akreditasi A, serta sosialisasi Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus kepada perpustakaan rumah sakit.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu perpustakaan secara berkelanjutan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Tanggal 25 Mei 2026: Pembinaan Re-akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, bagi UPT yang sebelumnya memperoleh Nilai Akreditasi B.
- b) Tanggal 26 Mei 2026: Pembinaan Surveilans bagi UPT berakreditasi A guna memastikan konsistensi pemenuhan standar mutu.
- c) Tanggal 08 Juni 2026: Sosialisasi Instrumen Akreditasi Perpustakaan Khusus dan Pembinaan Surveilans Perpustakaan Perguruan Tinggi yang memperoleh nilai B
- d) Tanggal 26 Mei 2026: Pembinaan Surveilans bagi UPT berakreditasi A guna memastikan konsistensi pemenuhan standar mutu.



2. Kegiatan Peningkatan Literasi Kesehatan Pemustaka TPA Serama

Dalam rangka mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan meningkatkan budaya literasi sejak usia dini, Perpustakaan Kementerian Kesehatan setiap bulan menyelenggarakan kegiatan Pustakawan Bercerita bagi anak-anak di Tempat Pengasuhan Anak (TPA) Serama Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang bertujuan memperluas peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, pengembangan karakter, dan peningkatan kecakapan literasi masyarakat.

Selama periode Januari sampai dengan Juni 2026, kegiatan melibatkan pustakawan dan tenaga pendukung perpustakaan dilaksanakan setiap hari Rabu, berlokasi di TPA Serama atau di Perpustakaan Kementerian Kesehatan. Materi yang disampaikan dengan bercerita menggunakan koleksi yang ada di Perpustakaan dan bernyanyi bersama. Tema disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran PAUD yang diterapkan di TPA Serama sehingga mendukung proses pembelajaran anak secara terintegrasi.

Tabel Kegiatan TPBIS di TPA Serama
Periode Januari – Juni 2026

No	Tanggal	Tema Buku	Tempat
1	14 Januari	Aku Suka Berteman	TPA Serama
2	11 Februari	Aku Suka Baca Buku	TPA Serama
3	11 Maret	Aku Suka Berhati - hati	Perpustakaan Kemenkes
4	15 April	Alam Semesta	Perpustakaan Kemenkes
5	13 Mei	Aku Pergi ke Dokter	TPA Serama
6	17 Juni	Aku Anak Santun	Perpustakaan Kemenkes



3. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Pustakawan di lingkungan kementerian kesehatan

Sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas pustakawan dan asisten pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menjalin kolaborasi dengan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam dalam menyelenggarakan program pembinaan kompetensi. Kegiatan ini diwujudkan melalui program *Webinar UPGREAT Series* yang menghadirkan narasumber ahli dari internal biro, Perpustakaan Nasional RI, serta praktisi dari UPT Kemenkes. Program pembinaan yang juga menjadi wadah *sharing session* ini sejalan dengan visi pengembangan *Kemenkes Corporate University*, yang menempatkan pembelajaran berkelanjutan sebagai pilar utama dalam merespons kebutuhan organisasi dan transformasi digital.

Sepanjang periode Semester I tahun 2026, pembinaan kompetensi ini telah direalisasikan melalui tiga seri webinar strategis. Seri perdana diselenggarakan pada 18 Mei 2026 dengan tema "Transformasi Digital Perpustakaan Kesehatan: *Digital Library & Artificial Intelligence (AI)*". Kegiatan yang diikuti oleh 204 peserta ini bertujuan membuka

wawasan pengelola perpustakaan terhadap inovasi layanan informasi berbasis kecerdasan buatan. Langkah penguatan kapasitas tersebut kemudian dilanjutkan pada 4 Juni 2026 melalui seri kedua bertajuk "Manajemen *Repository & Metadata*". Seri ini difokuskan pada penguatan tata kelola pengetahuan (*knowledge management*) serta peningkatan visibilitas karya ilmiah institusi, dan berhasil mencetak 157 peserta bersertifikat yang memenuhi seluruh standar pembelajaran.

Seri ketiga dengan tema "*Smart Librarian: Kupas Tuntas Analisis Bibliometrik*" pada tanggal 18 Juni 2026. Sebanyak 161 peserta yang dinyatakan tuntas dan bersertifikat dibekali dengan kompetensi kuantitatif untuk menganalisis publikasi ilmiah, memetakan tren riset, serta mengoperasikan berbagai perangkat analitik mutakhir seperti *Publish or Perish* hingga VOSviewer. Melalui sinergi pembinaan yang komprehensif ini, para tenaga perpustakaan diharapkan semakin profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menghasilkan analisis ilmiah yang bernilai strategis bagi Kementerian Kesehatan.

		
Digital Library & Artificial Intelligence (AI) Senin, 18 Mei 2026	Manajemen Repository dan Metadata Kamis, 4 Juni 2026	Kupas Tuntas Analisis Bibliometrik Kamis, 18 Juni 2026

4. Sertifikasi Pustakawan

Dalam rangka menjamin kompetensi profesional sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan rangkaian Sertifikasi Pustakawan Tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada Surat Nomor KP.03.02/A.V/1359/2026 tanggal 2 Juni 2026 ini diikuti oleh 65 pustakawan dari berbagai unit kerja. Guna memastikan kesiapan optimal peserta, tahapan diawali dengan kegiatan Pra-Assessment secara daring pada 18–19 Juni 2026 untuk memverifikasi kesesuaian portofolio dan bukti fisik pekerjaan calon asesi. Selanjutnya,

peserta mengikuti sesi Pembekalan pada 18 Juni 2026 yang mengupas tuntas teknik menghadapi uji kompetensi pada empat klaster utama, yakni: Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi, Layanan Dasar Perpustakaan, Promosi Perpustakaan, dan Pengembangan Bahan Perpustakaan.

Puncak pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan secara luring pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026 di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Jakarta I. Penyelenggaraan sertifikasi ini merupakan wujud sinergi strategis antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Sekretariat Ditjen SDM Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan. Proses asesmen dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik bersama Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan RI, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian komprehensif melalui metode verifikasi portofolio, wawancara, observasi, dan demonstrasi kompetensi.

Secara keseluruhan, rangkaian tahapan sertifikasi berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur baku. Dari total 65 peserta yang diuji, sebanyak 58 orang berhasil dinyatakan Kompeten (K) pada klaster yang dipilih, sementara 7 orang lainnya dinyatakan Belum Kompeten (BK) dan akan diberikan fasilitasi untuk mengikuti asesmen ulang (*reassessment*). Capaian ini membuktikan bahwa mayoritas pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah memenuhi standar profesi nasional secara memadai. Keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi ini tidak hanya menjadi wujud pengakuan profesional, tetapi juga menjadi modal esensial dalam mengakselerasi peningkatan kualitas layanan, mendukung transformasi perpustakaan kesehatan, serta menjadi pijakan evaluasi dalam menyusun program pembinaan kepustakawanan lanjutan ke depannya.





5. Bedah Buku Kesehatan Mental

Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buku Sedunia pada 23 April 2026, Perpustakaan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku Kesehatan Mental. Kegiatan ini diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, lalu dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, Ph.D. Dalam arahannya, Wakil Menteri Kesehatan menekankan urgensi kepedulian bersama terhadap luka psikologis yang kerap tidak kasatmata, guna memastikan kelompok remaja tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan mentalnya.

Acara dilanjutkan dengan pengantar dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, dr. Imran Pambudi, MPH, yang secara khusus membedah buku *Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis bagi First Aider di Sekolah Jenjang SMP dan SMA*. Dalam pemaparannya, urgensi intervensi tergambar jelas melalui data *National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS)* yang menunjukkan 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir. Lebih lanjut, hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2025 turut mengindikasikan bahwa kelompok usia sekolah dan remaja memiliki kemungkinan gejala depresi dan kecemasan hampir lima kali lipat lebih besar dibandingkan usia dewasa maupun lansia. Merespons dinamika tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan gelar wicara (*talkshow*) interaktif bersama perwakilan Guru BK SMK PKP 1 DKI Jakarta dan Psikolog Klinis Puskesmas Ciracas, Sulastry Pardede, S.Psi., M.Psi. Sesi diskusi ini secara komprehensif mengupas peran esensial guru BK dalam membangun lingkungan sekolah yang sehat jiwa serta penerapan prinsip dasar P3LP, yaitu *look, listen, dan link*.

Guna menstimulasi antusiasme dan partisipasi publik, kegiatan edukasi ini turut diperkaya dengan pameran buku mini, permainan interaktif, dan fasilitas pemeriksaan kesehatan mental melalui analisis pembuluh darah. Secara keseluruhan, penyelenggaraan

bedah buku ini membuahkan hasil yang berdimensi strategis. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya deteksi dini kesehatan mental, sekaligus mendiseminasikan secara luas buku saku P3LP kepada pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Melalui momentum kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan mitra pembangunan, kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang suportif dan aman secara psikologis semakin terbangun. Kegiatan ini juga mempertegas komitmen Perpustakaan Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dengan menyebarkan akses informasi kesehatan yang valid dan terpercaya kepada masyarakat.



6. *Benchmarking* Perpustakaan Institusi Di Kementerian Agama

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan literasi informasi kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan kegiatan *benchmarking* ke Perpustakaan Kementerian Agama pada 4 Januari 2026. Kegiatan yang mengusung tema "Diskusi Film Moderasi Beragama dalam Upaya Peningkatan Literasi Informasi Kesehatan" ini bertujuan untuk menggali wawasan, berbagi praktik baik, serta peluang kolaborasi strategis dalam pengembangan layanan perpustakaan yang inklusif dan edukatif.

Rangkaian kegiatan diisi dengan *sharing session* interaktif terkait tata kelola kelembagaan, di mana Perpustakaan Kementerian Agama memaparkan dinamika peralihan fungsinya di bawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). Selain berbagi pengalaman mengenai strategi literasi publik, tim Kementerian Kesehatan juga berkesempatan meninjau langsung fasilitas unggulan yang dimiliki, termasuk penyediaan koleksi inklusif seperti Al-Qur'an Braille dan terjemahan bahasa daerah. Kunjungan ini secara khusus menyoroti pemanfaatan *mini theater* dalam memutar film pendek edukatif bertema toleransi. Hal ini memberikan wawasan baru bahwa pendekatan media audio-visual memiliki efektivitas tinggi dalam menyampaikan pesan sosial maupun edukasi secara emosional dan lebih mudah diingat oleh masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan *benchmarking* tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik merumuskan sejumlah tindak lanjut strategis untuk diadaptasi. Rekomendasi tersebut meliputi rencana pengkajian fasilitas multimedia atau *mini theater* sebagai sarana promosi kesehatan, pengembangan konten literasi berbasis audio-visual, serta peningkatan penyediaan bahan pustaka yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi landasan kuat untuk menjalin kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan pendekatan sosial budaya dan keagamaan dalam strategi komunikasi kesehatan, sehingga diseminasi informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas.



7. Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Kesehatan

a. Kunjungan Langsung Pemustaka Perpustakaan

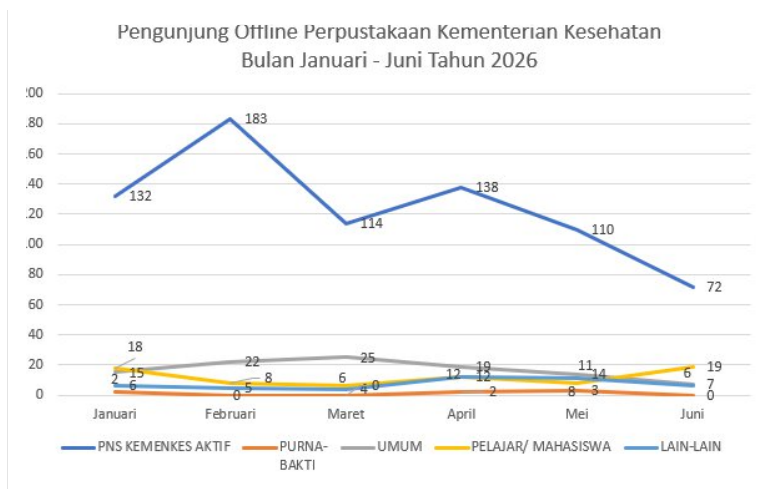
Sebagai perpustakaan khusus yang telah meraih predikat Akreditasi A dari Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus menyelenggarakan layanan prima yang berpedoman pada standar mutu tersebut. Guna memfasilitasi kebutuhan literasi, layanan kunjungan langsung bagi pemustaka beroperasi secara optimal pada hari kerja, yakni hari Senin hingga Kamis pukul 07.00–16.00 WIB, serta hari Jumat pukul 07.00–16.30 WIB.

Sejalan dengan komitmen adaptasi teknologi, Perpustakaan Kementerian Kesehatan juga mengakselerasi peningkatan kualitas layanannya melalui transformasi digital. Upaya inovatif ini direalisasikan melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai sistem informasi terpadu, di antaranya sistem *Inlislite*, aplikasi *Electronic Library* Kesehatan (E-Likes), repositori koleksi institusi, hingga revitalisasi Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK). Melalui integrasi infrastruktur fisik dan digital tersebut, perpustakaan mampu menyajikan layanan sirkulasi atau simpan pinjam koleksi literatur yang komprehensif dan fleksibel, baik bagi pemustaka yang berkunjung secara langsung maupun yang mengaksesnya secara virtual.

Tabel Laporan Pengunjung Offline Perpustakaan Kemenkes

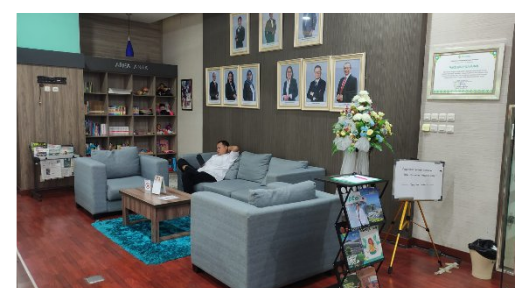
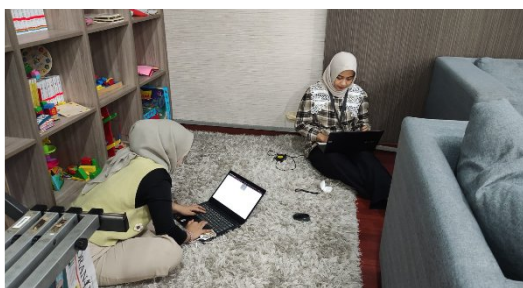
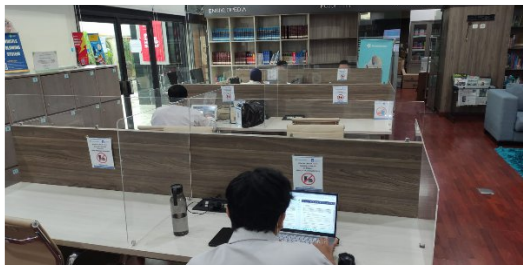
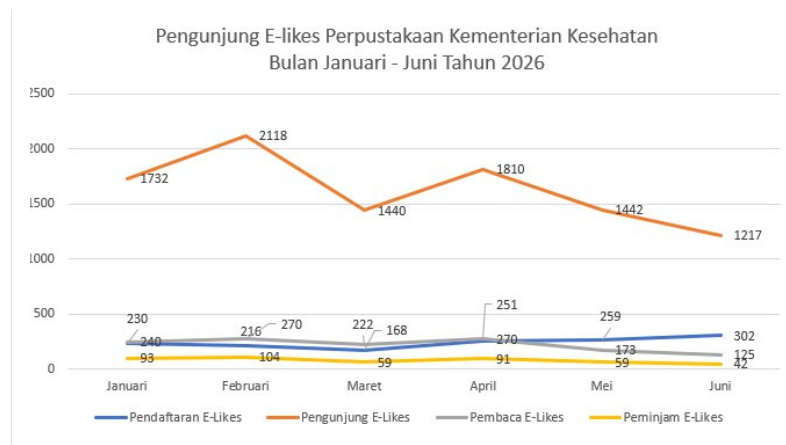
Bulan Januari – Juni Tahun 2026

Bulan	PNS Kemenkes Aktif	PNS Kemenkes Purnabakti	Masyarakat Umum	Pelajar/Mahasiswa	Lain- lain	Jumlah
Januari	132	2	15	18	6	173
Februari	183	0	22	8	5	218
Maret	114	0	25	6	4	149
April	138	2	19	12	12	183
Mei	110	3	14	8	11	146
Juni	72	0	7	19	6	104
Jumlah						973



Tabel Laporan Pengunjung E-likes Perpustakaan Kemenkes
Bulan Januari – Juni Tahun 2026

Bulan	Pendaftaran	Pengunjung	Pembaca	Peminjam	Jumlah
Januari	230	1732	240	93	2295
Februari	216	2118	270	104	2708
Maret	168	1440	222	59	1889
April	251	1810	270	91	2422
Mei	259	1442	173	59	1933
Juni	302	1217	125	42	1686
Jumlah					12933

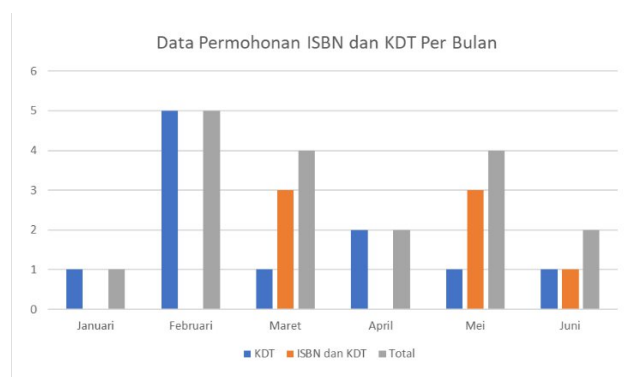


b. Permohonan KDT dan ISBN

Mengacu pada Permenkes Nomor 38 Tahun 2015, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bertindak sebagai koordinator pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN) dan Katalog Dalam Terbitan (KDT) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pengajuan ini difasilitasi melalui mekanisme *Single Account* Perpustakaan Kemenkes yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/26954/2023, dengan pengecualian bagi unit Politeknik Kesehatan yang mengelola akunnya secara mandiri. Berdasarkan kriteria ketat dalam Peraturan Perpustakaan Nomor 5 Tahun 2022, tidak seluruh publikasi instansi dapat diberikan ISBN. Terbitan yang bersifat internal, berupa modul, laporan, atau ditujukan untuk lingkup terbatas diarahkan untuk hanya mendapatkan nomor KDT.

Sepanjang Semester I Tahun 2026, telah difasilitasi pengajuan untuk 18 judul terbitan. Rinciannya, 6 judul berhasil diproses untuk mendapatkan KDT dan ISBN, sementara 12 judul lainnya diajukan khusus untuk KDT. Permohonan ini diajukan oleh berbagai unit kerja yang mulai tertib mempublikasikan karyanya, di antaranya Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Setditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, serta sejumlah Direktorat (Produksi dan Distribusi Farmasi, Promosi Kesehatan, Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, Surveilans dan Karantina Kesehatan, Penyakit Menular, dan Pelayanan Kesehatan Keluarga).

Sebagai wujud kepatuhan terhadap kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pemohon wajib menyerahkan hasil terbitannya melalui portal *isbn.kemkes.go.id* atau surat elektronik, untuk selanjutnya didiseminasikan secara luas melalui repositori institusi (*repository.kemkes.go.id*). Dari total 18 permohonan pada paruh pertama tahun ini, tercatat 14 permohonan di antaranya telah menyelesaikan tahapan administrasi serah simpan terbitannya secara tertib.



c. Pathfinder, Infografis, dan Literasi Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Sebagai wujud komitmen dalam mempermudah akses dan meningkatkan pemahaman pemustaka terhadap literatur kesehatan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan secara proaktif mengembangkan inovasi produk layanan informasi, yang meliputi penyusunan *Pathfinder*, Infografis, dan Paket Literasi Informasi.

1) Pathfinder

Pathfinder dikembangkan sebagai panduan literatur komprehensif susunan pustakawan yang memuat kurasi sumber informasi seperti buku, jurnal, situs web, dan video secara tematik. Panduan yang ditargetkan terbit sebanyak delapan edisi setiap tahunnya ini berfokus pada isu seputar peringatan hari kesehatan, pengenalan penyakit, serta informasi kesehatan umum. Guna memperluas jangkauan akses, *Pathfinder* telah didigitalisasi dalam format *Flipbook* interaktif yang dapat diakses publik melalui laman <https://perpustakaan.kemkes.go.id/>.

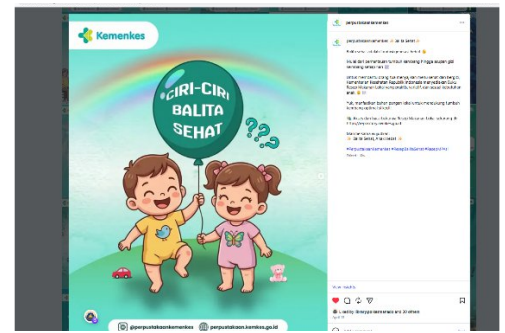
Tabel Pathfinder
Periode Januari - Juni 2026

No	Topik	Rilis
1	Pathfinder Moebius Syndrome	Mei
2	Pathfinder Hari Gizi Nasional 2026	
3	Hari Kusta Sedunia 2026	
4	Pathfinder Hari Kanker Sedunia 2026	
5	Pathfinder Hantavirus 2026	
6	Pathfinder Polusi Udara	
7	Pathfinder Kanker Anak	
8	Pathfinder Hari Penyakit Langka Sedunia 2026	
9	Pathfinder Nutrilevel	
10	Pathfinder Ebola	Juni
11	Pathfinder Kesehatan Telinga dan Pendengaran 2026	
12	Pathfinder Kesehatan Gigi dan Mulut 2026	
13	Pathfinder Kesehatan Ginjal 2026	
14	Pathfinder Down Syndrome 2026	

2) Infografis

Guna menyesuaikan dengan tren konsumsi informasi digital, perpustakaan juga memproduksi Infografis untuk mentransformasikan data kesehatan ke dalam representasi visual yang menarik dan mudah dipahami. Bersumber dari koleksi pustaka dan literatur

digital yang kredibel, infografis ini didiseminasikan secara berkala melalui akun Instagram resmi perpustakaan guna mendukung audiens secara efektif.



3) Literasi Informasi

Literasi informasi merupakan kemampuan seorang individu untuk mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan serta untuk menemukan, mengevaluasi, efektif menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format. Pustakawan sebagai *The Guardian of Information* harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan dan dapat ditawarkan kepada pustakawan.

Literasi informasi pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI merupakan sebuah produk yang dibuat untuk memudahkan pemustaka mendapatkan informasi secara cepat dan sebagai sebuah referensi. Literasi Informasi di Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam bentuk sebuah paket informasi yang berisikan sebuah jawaban umum dari sebuah pembahasan topik beserta informasi mengenai topik tersebut. Adapun tahapan dalam pembuatan literasi informasi yaitu: identifikasi kebutuhan informasi, penelusuran informasi, evaluasi informasi, analisis sintesis dan diseminasi informasi.

8. Bimbingan Pemustaka

Bimbingan pemustaka dilakukan Perpustakaan Kementerian Kesehatan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan audiens dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan literasi informasi. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman pencarian dan penggunaan sumber informasi yang relevan dalam mendukung tugas di lapangan, dan penguatan kapasitas mengenai pengetahuan terkait koleksi perpustakaan terkait kesehatan masyarakat yang dapat diakses melalui laman perpustakaan yaitu repository.kemkes.go.id dan <https://kubuku.id/download/electronic-library-kemenkes> sebagai aplikasi android.

Bimbingan pemustaka dalam rangka kegiatan *Company Visit Pre-Event Public Health Career Summit* (PHCS) 2026 yang diselenggarakan oleh BEM IM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswa FKM UI dan FKM Non-UI yang berkunjung ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Gedung Dr. Adhyatma, MPH Lantai 1, sebagai bagian dari rangkaian *office tour* dalam kegiatan *company visit* tersebut.

Kegiatan bimbingan pemustaka ini disambut dengan antusias oleh para peserta, yang aktif bertanya dan mencoba mengakses layanan perpustakaan secara langsung. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa FKM UI dapat terus memanfaatkan layanan dan koleksi Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu sumber referensi terpercaya di bidang kesehatan masyarakat, baik untuk keperluan studi maupun pengembangan karier di masa mendatang.

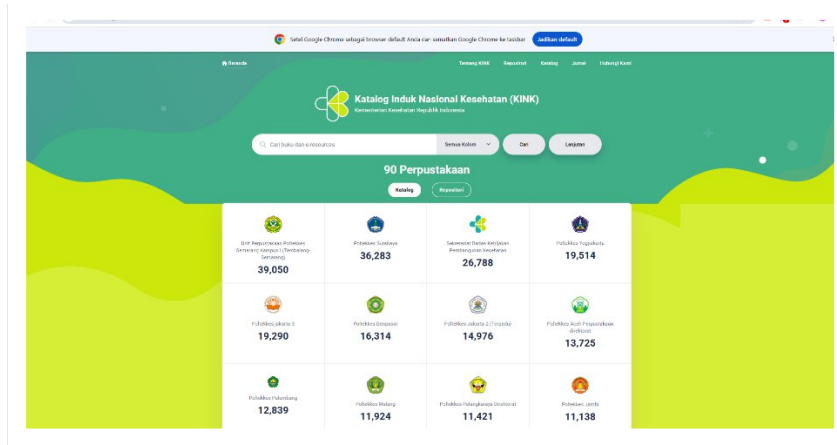


9. Pemeliharaan Aplikasi Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan perpustakaan di era digital, operasional Perpustakaan Biro Komunikasi dan Informasi Publik didukung oleh infrastruktur teknologi berupa 1 server *colocation* dan 3 server *hosting* yang terintegrasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan. Merespons maraknya ancaman insiden keamanan siber, mitigasi risiko mutlak dilakukan melalui pembaruan aplikasi (*update*) dan pencadangan data (*backup*) secara rutin. Guna memastikan pemeliharaan multimodul ini berjalan efisien, komprehensif, dan tidak tumpang tindih, pelaksanaannya dikelola dengan melibatkan pihak ketiga. Pada tahun 2026, alokasi anggaran pemeliharaan sistem perpustakaan (mencakup *website*, KINK, dan aplikasi ISBN) dikoordinasikan bersama Pusdatin.

Upaya penguatan keandalan sistem tersebut berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas dan integrasi data dalam Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK) yang dapat diakses publik melalui <https://kink.kemkes.go.id/>. Sepanjang tahun 2026, data pangkalan

ini mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah koleksi *Online Public Access Catalog* (OPAC) gabungan dari seluruh perpustakaan di lingkungan Kemenkes melonjak dari 331.548 judul (tahun 2025) menjadi 454.023 judul pada tahun 2026. Tren positif yang sama juga ditunjukkan pada jumlah koleksi repositori institusi, yang meningkat pesat dari 114.734 judul menjadi 148.269 judul.



10. Pengelolaan Bahan Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Pengelolaan bahan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan secara profesional guna memudahkan penelusuran kembali, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2016. Pengklasifikasian koleksi dilakukan menggunakan standar baku *Dewey Decimal Classification* (DDC) untuk penentuan nomor kelas dan *Medical Subject Heading* (MeSH) untuk penentuan tajuk subjek. Seluruh data bahan pustaka yang telah diolah kemudian diinput ke dalam INLISLite, yakni aplikasi sistem otomasi perpustakaan terpadu yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Sepanjang tahun 2026, penambahan koleksi perpustakaan bersumber sepenuhnya dari skema hibah baik dari pimpinan, pemangku kepentingan, maupun hasil kewajiban serah simpan karya cetak dari unit kerja mengingat tidak adanya alokasi pembelian bahan pustaka baru. Pada pelaksanaannya di Triwulan I dan Triwulan II, proses pengolahan difokuskan secara eksklusif pada bahan pustaka digital. Hal ini merupakan langkah penyesuaian dikarenakan sistem INLISLite sedang mengalami kendala teknis yang belum memungkinkan dilakukannya pengolahan bahan pustaka tercetak. Melalui strategi tersebut, perpustakaan tetap berhasil mencatatkan kinerja pengolahan bahan pustaka digital sebanyak 11 judul pada Triwulan I dan 12 judul pada Triwulan II.

11. Survei Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Guna mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan secara proaktif melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan frekuensi setiap triwulan. Pada laporan Semester I ini, data yang disajikan memfokuskan pada hasil pengukuran Triwulan I (Januari–Maret 2026) yang melibatkan 33 responden. Profil demografi pemustaka pada periode ini didominasi oleh perempuan (58%), berpendidikan S1 (76%), berstatus ASN Kementerian Kesehatan (79%), dan berada pada kelompok usia produktif 26–40 tahun (58%).

Secara akumulatif, hasil pengukuran menunjukkan capaian yang sangat positif. Mayoritas pemustaka (88%) telah aktif memanfaatkan layanan dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja perpustakaan. Secara spesifik, 100% responden menilai prosedur layanan sangat mudah dan mengonfirmasi bahwa seluruh fasilitas dapat diakses tanpa pungutan biaya. Kinerja tenaga perpustakaan juga dinilai sangat memuaskan, baik dari indikator kemampuan membantu informasi (100% menilai baik/sangat baik) maupun aspek keramahan pelayanan (100% menilai sangat baik/baik). Selain itu, indikator kesesuaian waktu pelayanan dan pemenuhan syarat akses dinilai telah memenuhi ekspektasi oleh lebih dari 94% responden.

Di samping capaian positif tersebut, survei ini memetakan area strategis yang memerlukan tindak lanjut perbaikan guna penyempurnaan layanan. Pada aspek sarana dan prasarana, pemustaka merekomendasikan perluasan tata ruang perpustakaan, perbaikan kondisi kursi baca, optimalisasi pendingin ruangan (AC), serta penambahan fasilitas stop kontak di setiap meja baca. Sementara itu, pada aspek pengembangan koleksi literatur, pemustaka mengharapkan adanya pembaruan dan penambahan bahan pustaka spesifik, seperti jurnal kesehatan masyarakat terkini, literatur administrasi dan ekuitas kesehatan, pedoman teknologi seperti *Artificial Intelligence*, hingga penambahan koleksi fiksi dan novel.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- a. Pemanfaatan sistem layanan multikanal dan aplikasi terintegrasi (Ecentrix, OMNIX, dan SP4N-LAPOR!)
- b. Kecepatan respons, kepatuhan, dan tindak lanjut unit kerja terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat
- c. Efektivitas kelembagaan PPID dan kepatuhan layanan terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik
- d. Kelancaran koordinasi lintas sektor (DPR/DPD, Pemda) serta ketersediaan data substansi teknis
- e. Optimalisasi publikasi digital dan penyesuaian pola *media monitoring* terhadap dinamika isu publik
- f. Tingkat pemanfaatan aplikasi INLISLite serta kepatuhan administrasi pemohon dalam pengajuan KDT dan ISBN.
- g. Kompetensi, komitmen, dan pemerataan pemahaman SDM pengelola (pustakawan, humas, admin layanan)
- h. Ketersediaan sarana prasarana penunjang (Studio Podcast, alat, personel) di tengah efisiensi alokasi anggaran.
- i. Konsistensi pemantauan evaluasi kinerja triwulanan dan *Service Level Agreement* (SLA) melalui *dashboard*.

2. Permasalahan

- a. Belum optimalnya pemeliharaan dan kelancaran akses sistem aplikasi pendukung layanan utama (Ecentrix, OMNIX, Microsip, dan INLISLite).
- b. Belum meratanya pemahaman dan kecepatan unit kerja dalam menyelesaikan pengaduan SP4N-LAPOR! dan pemenuhan informasi PPID sesuai standar waktu (SLA)
- c. Kurangnya keseragaman bahan, lambatnya sinkronisasi data antar-unit teknis, serta inkonsistensi pesan yang menyulitkan penanganan isu kesehatan dan rapat lintas sektor (RDP)
- d. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai (alat peliputan rusak, ketiadaan *memory card*) serta lokasi studio *podcast* yang sulit diakses narasumber.
- e. Lambatnya koordinasi lintas unit dan kompleksitas birokrasi yang memperpanjang waktu penyelesaian aduan (SP4N-LAPOR!) dan permohonan informasi publik (PPID).
- f. Belum meratanya pemahaman dan kapasitas pengelola layanan terkait klasifikasi informasi, penanganan aduan, dan operasionalisasi aplikasi.

- g. Ketidakpatuhan pemohon internal terhadap syarat administrasi dan kelayakan dokumen pengajuan KDT maupun ISBN
- h. Belum maksimalnya pelibatan tokoh masyarakat/*influencer* dalam amplifikasi program, serta minimnya partisipasi responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- i. Ketidakpatuhan pemohon internal terhadap syarat administrasi dan kelayakan dokumen pengajuan KDT maupun ISBN.

3. Pemecahan Masalah

- a. Kolaborasi pembiayaan kegiatan dan honor narasumber lintas unit pemilik program serta pelibatan mitra pembangunan
- b. Optimalisasi pemantauan *Service Level Agreement* (SLA) layanan publik menggunakan *dashboard omnichannel* (Ecentrix, OMNIX).
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pendampingan daring rutin bagi admin pengelola SP4N-LAPOR!, PPID, serta UPT.
- d. Percepatan konsolidasi data, pembagian PIC spesifik, dan penyiapan *press brief* untuk pendampingan agenda pimpinan/RDP
- e. Peningkatan kompetensi SDM teknis melalui skema *transfer knowledge* internal antaranggota tim kerja.
- f. Pengalihan permohonan ke e-ISBN/KDT khusus dan pemenuhan koleksi perpustakaan melalui jalur penerimaan hibah.
- g. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala yang didukung komitmen pimpinan dan koordinasi formal antarunit.

4. Rencana Tindak Lanjut

- a. Penguatan jejaring kolaborasi komunikasi publik lintas program dan lintas sektor.
- b. Standardisasi instrumen pendampingan pimpinan (matriks, *checklist*, bank bahan) serta penyusunan SOP respons cepat konferensi pers.
- c. Pengajuan peremajaan peralatan peliputan, pemeliharaan rutin, serta peningkatan kapasitas SDM melalui program *transfer knowledge* internal.
- d. Optimalisasi integrasi aplikasi operasional (Ecentrix, OMNIX) dan pengembangan fitur layanan mandiri (*chatbot*) pada Halo Kemenkes.
- e. Penguatan penerapan standar interaksi pelayanan publik bagi seluruh UPT melalui sosialisasi dan simulasi (*roleplay*)
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis akreditasi perpustakaan, diklat literasi informasi, serta edukasi berkelanjutan terkait tata cara pengajuan ISBN
- g. Sosialisasi komprehensif terkait *Grand Design* Perpustakaan Kementerian Kesehatan

- h. Penarikan data perpustakaan secara mingguan sebagai langkah mitigasi risiko serta pengawalan pemeliharaan INLISLite bersama Pusdatin.

C. INOVASI KINERJA

Pada Tahun 2026, Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengimplementasikan inovasi strategis berupa *Management Support Hub* (MANHUB). Inovasi ini menjadi fokus utama transformasi internal biro yang dirancang untuk memperkuat tata kelola melalui pengintegrasian data dan peningkatan efisiensi birokrasi secara menyeluruh.

MANHUB hadir sebagai solusi atas tantangan fragmentasi data administratif yang selama ini menghambat efektivitas operasional. Sebagai inovasi digital berupa *microsite* terpadu, MANHUB dirancang sebagai pusat kendali tunggal (*single source of truth*) yang secara sistematis menyatukan tata kelola data Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan keuangan, administrasi aset atau Barang Milik Negara (BMN), serta sistem kearsipan ke dalam satu pintu akses digital yang tersentralisasi.

Guna memastikan efektivitas sistem, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan rangkaian sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai biro. Saat ini, penggunaan MANHUB telah diimplementasikan sepenuhnya dalam mendukung alur kerja harian seluruh pegawai, sehingga setiap unit kerja dapat memanfaatkan akses layanan administrasi secara mandiri.

Implementasi inovasi ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kerja biro, terutama melalui percepatan layanan internal. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan presisi. Selain itu, penggunaan MANHUB memastikan tercapainya akurasi data yang lebih baik, sehingga pimpinan memiliki basis data yang valid dalam mengambil keputusan strategis. Dengan dukungan sistem manajemen yang tangkas ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memastikan seluruh sumber daya dikelola dengan efektif dan akuntabel, guna mendukung pencapaian target kinerja utama biro secara optimal.

D. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN

1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal sampai dengan Juni 2026 berjumlah 90 orang, dengan rincian sebagai berikut:

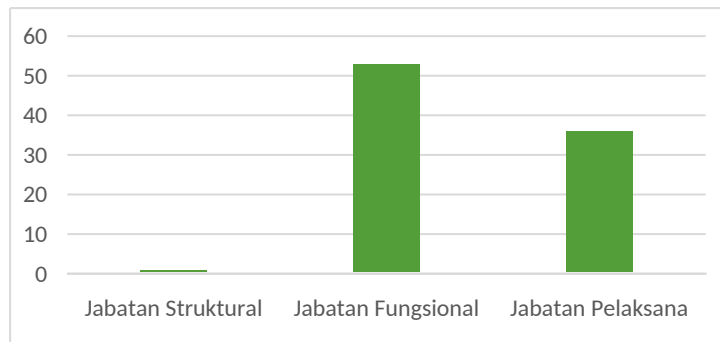
a) Menurut Jabatan

Jabatan Struktural : 1 Orang

Jabatan Fungsional

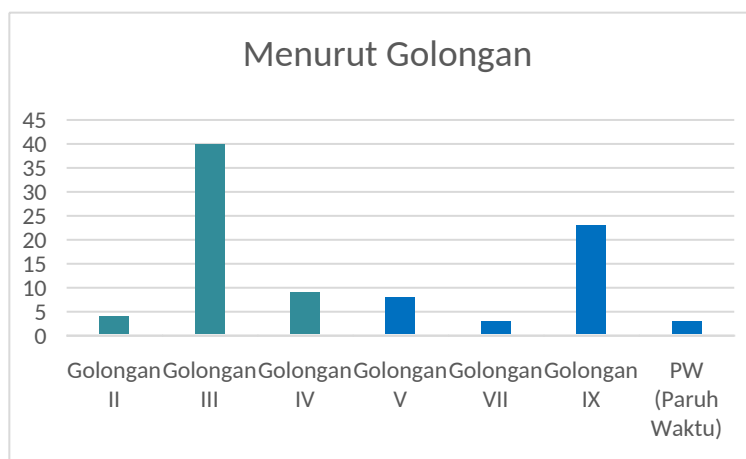
- Pranata Humas : 37 Orang
- Pustakawan : 7 Orang
- Pranata Komputer : 2 Orang
- Perencana : 1 Orang
- Arsiparis : 2 Orang
- Keuangan : 4 Orang

Jabatan Pelaksana : 36 Orang



b. Menurut Golongan

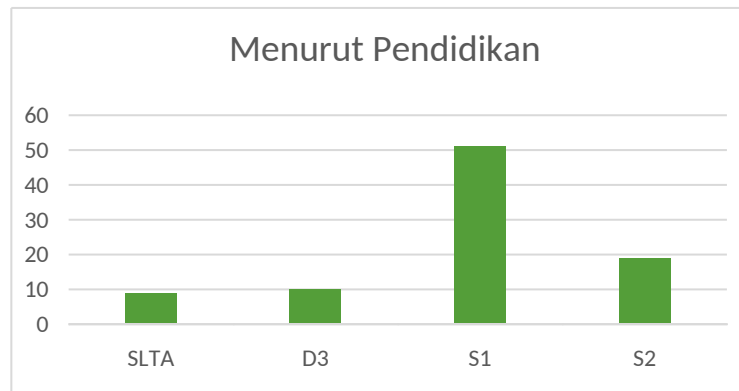
- Golongan II : 4 Orang
- Golongan III : 40 Orang
- Golongan IV : 9 Orang
- Golongan V : 8 Orang
- Golongan VII : 3 Orang
- Golongan IX : 23 Orang
- PW (Paruh Waktu) : 3 Orang



c. Menurut Pendidikan

- SLTA : 9 Orang

D3 : 10 Orang
S1 : 51 Orang
S2 : 19 Orang



Seiring dengan penyempurnaan sistem manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, mekanisme pengukuran dan pelaporan pengembangan kompetensi pegawai mengalami transformasi strategis pada tahun 2026. Pada periode sebelumnya (Tahun 2025), dokumentasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaporkan secara inventaris melalui rincian daftar riwayat pelatihan teknis maupun non-teknis yang diikuti oleh masing-masing pegawai.

Pendekatan pelaporan yang bersifat *output-based* tersebut disempurnakan menjadi lebih holistik dan terukur melalui instrumen Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) target capaian nilai IP ASN sebesar 81. Guna memenuhi target indikator tersebut, setiap pegawai didorong untuk secara proaktif meningkatkan nilai IP ASN masing-masing melalui keikutsertaan dalam berbagai program pelatihan terstruktur, seminar, maupun sertifikasi keahlian yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerja, Biro Komunikasi dan Informasi Publik didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP SP DIPA-024.01.1.465921/2026 tanggal 22 Desember 2026 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2026

Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Refocusing (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
11.150.000.000	9.542.529	1.607.471.000	4.659.767.212	48,83

Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk alokasi sasaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi. Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 – 2026

Uraian Kegiatan	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	12.823.857.000	12.661.731.942	98,74	11.150.000.000	4.659.767.212	48,83

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Per Output

Program	Output	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen, Kegiatan, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	498.510.000	364.314.400	73,08
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.902.084.000	1.898.134.803	99,79
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Tingkat K/L	7.141.935.000	2.397.318.009	33,57

Matriks Target Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2026

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	T 2024	R 2024	T 2025	R 2025	T 2026	R 2026
----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	N/A	N/A	77	85,79	86	0
		INDIKATOR KINERJA KINERJA						
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	N/A	N/A	77	81,74	82	0
		Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	44	40	41	70	0

Pada periode awal tahun anggaran 2026, indikator kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengalami penyesuaian target yang didasarkan pada tren capaian positif di tahun sebelumnya. Pada indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan, target tahun 2026 dinaikkan menjadi 86. Penyesuaian ini merupakan langkah responsif setelah melihat realisasi tahun 2025 yang berhasil melampaui ekspektasi, yakni mencapai 85,79 dari target awal 77. Pola penguatan serupa juga diterapkan pada Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal, di mana targetnya dikalibrasi menjadi 82 untuk mengimbangi capaian realisasi tahun 2025 yang menyentuh angka 81,74. Kenaikan target pada kedua indikator indeks ini mengindikasikan komitmen biro untuk tidak sekadar berpuas diri pada capaian tahun sebelumnya, melainkan terus memacu kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dinamika perubahan yang paling terlihat pada indikator Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan. Jika pada tahun sebelumnya target stabil pada angka 40 UPT dengan realisasi di angka 44 pada 2024 dan 41 pada 2025, maka target untuk tahun 2026 dielevasi secara tajam menjadi 70 UPT. Target ini mencerminkan adanya pergeseran strategi kebijakan, dari yang sebelumnya berfokus pada stabilisasi, kini mengarah pada pemerataan standar pelayanan publik secara masif di seluruh wilayah kerja.

Oleh karena itu, tantangan utama di tahun 2026 turut bergeser dari fase adaptasi metodologi penilaian menjadi fase eskalasi dan pembinaan nyata. Fokus kerja ke depan perlu adanya pendampingan yang jauh lebih intensif kepada UPT agar mampu mengejar standar pelayanan yang ditetapkan. Pada saat yang bersamaan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga dihadapkan pada kewajiban untuk mempertahankan konsistensi kepuasan masyarakat di tengah target yang semakin tinggi. Adapun terkait pencapaian kinerja pada pelaporan Semester I ini, seluruh indikator pada kolom Realisasi Tahun 2026 (R 2026) masih berstatus 0 (nihil). Angka tersebut belum merepresentasikan capaian final, melainkan menunjukkan bahwa proses pengukuran, survei kepuasan, dan konsolidasi data kinerja dari berbagai UPT masih berproses dan belum diakumulasikan. Seluruh hasil akhir dari evaluasi indikator kinerja tersebut baru akan dapat diukur secara komprehensif dan dilaporkan realisasi definitifnya pada pertengahan Semester II.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Komunikasi dan Informasi Publik terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor. Berdasarkan Data pada Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2026, nilai sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam akun neraca dapat dijelaskan dibawah ini:

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - SUB SATKER
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 024010199465921035KP KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Tgl.Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl.Cetak : 14/07/26 8:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_subsatker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	17,943,000
132111	Peralatan dan Mesin	10,266,385,814
135121	Aset Tetap Lainnya	547,085,080
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9,070,301,983)
162151	Software	380,417,936
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,018,653,188
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,779,570,468)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(380,417,936)
J U M L A H		2,000,194,631

Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Komunikasi dan Informasi Publik

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	642.678.400
2	3020101003	Station Wagon	1	225.229.106
3	3020104001	Sepeda Motor	1	14.810.000
4	3020201004	Lori Dorong	2	3.850.000
5	3030205002	Tool Kit Box	1	3.300.000
6	3030301064	Memori Programmer	5	10.878.000
7	3050201033	Sofa	1	24.975.000
7	3050103007	Mesin Fotocopy Folio	1	46.411.500
8	3050104001	Lemari Besi/Metal	18	64.900.640
9	3050104002	Lemari kayu	62	316.793.050
10	3050104003	Rak Besi	2	187.437.250
11	3050104004	Rak Kayu	7	51.150.000
12	3050205004	Teko Listrik	1	161.700
13	3050104016	Roll Opek	1	40.700.000
14	3050104020	Lemari Display	1	2.201.000
15	3050105007	CCTV – Camera Control Television	3	59.433.000

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
		System		
16	3050105015	Alat Penghancur Kertas	5	23.825.500
17	3050105048	LCD Projector/Infocus	5	47.850.000
18	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	11	108.570.000
19	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	21.610.000
20	3050201003	Kursi Besi/Metal	222	394.074.195
21	3050201004	Kursi Kayu	2	15.800.000
22	3050201008	Meja Rapat	35	133.951.000
23	3050201014	Meja Resepsionis	3	16.972.000
24	3050201019	Meja Makan Kayu	2	5.280.000
25	3050201021	Pot Bunga	3	5.610.000
26	3050201028	Workstation	70	585.526.000
27	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.692.800
28	3050204001	Lemari Es	5	10.510.500
29	3050204004	A.C. Split	11	103.224.000
30	3050206002	Televisi	36	976.083.180
31	3050206007	Loudspeaker	2	11.779.416
32	3050206012	Wireless	8	250.466.750
33	3050206014	Microphone	12	51.922.000
34	3050206019	Stabilisator	1	3.496.500
35	3050206020	Camera Video	7	191.927.000
36	3050206034	Tangga Aluminium	1	588.500
37	3050206036	Dispenser	7	15.173.400
38	3050206057	Vertikal Blind	1	17.737.500
39	3060101003	Audio Mixing Stationer	3	99.680.520
40	3060101008	Audio Monitor Active	2	14.307.500
41	3060101022	Telephone Hybrid	1	8.827.500
42	3060101036	Microphone/Wireless MIC	13	190.365.000
43	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	28.700.000
44	3060101088	Voice Recorder	23	15.386.800
45	3060102003	Camera Electronic	8	4.950.000
46	3060102016	Video Switcher	2	35.090.000
47	3060102024	Video Processor	1	16.500.000
48	3060102034	Teleprompter	1	3.885.000

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
49	3060102045	Tripod Camera	9	17.575.000
50	3060102060	Camera Film	5	67.712.600
51	3060102061	Lensa Kamera	21	387.600.000
52	3060102118	Head Set	39	38.358.478
53	3060102120	Lighting Head Body	6	5.299.300
54	3060102121	Lighting Mechanic	4	44.568.700
55	3060102128	Camera Digital	19	478.586.000
56	3060102129	Tas Kamera	2	3.221.750
56	3060102130	Lampu Blitz Kamera	8	20.574.000
57	3060102158	Monopod	2	3.509.500
58	3060102164	Video Splitter	1	11.384.100
59	3060102167	Drone	1	35.000.000
60	3060102170	Gimbal Tripod	1	1.998.000
61	3060102999	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	3	11.000.000
62	3060199999	Alat Studio Lainnya	3	3.135.000
63	3060201001	Telephone (PABX)	2	29.079.600
64	3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	123.527.273
65	3060201003	Pesawat Telephone	1	39.600.000
66	3060201004	Telephone Mobile	42	183.584.000
67	3060201010	Facsimile	3	1.575.000
68	3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	1	20.000.000
69	3080111137	Tripod	10	35.971.650
70	3080112025	Stabilizer	2	8.436.000
71	3080153053	Laboratory Air Conditioner 1.50 HP	1	19.800.000
72	3080715005	Lighting Equipment	5	21.851.000
73	3090405010	Digital Signature Pad	2	3.660.000
74	3100102001	P.C Unit	172	1.496.337.430
75	3100102002	Laptop	26	573.222.988
76	3100102003	Note Book	87	717.604.088
77	3100102009	Tablet PC	2	28.138.500
78	3100201012	Hard Disk	31	87.038.350
79	3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4	8.214.000
80	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	7.390.000
81	3100202015	Auto Switch/Data Switch	5	14.744.400

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
82	3100202017	Speaker Komputer	2	3.289.000
83	3100203002	Monitor	7	7.495.000
84	3100202003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	53	186.443.330
85	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	27.597.800
86	3100203017	External Portable Hardisk	4	33.307.900
87	3100204001	Server	11	1275.747.220
88	3100204038	Wireless IP Camera	2	54.000.000
89	3150405006	Air Conditioning (AC)	9	156.873.200
90	3170122014	Microwave Heater	1	1.498.500
91	3170124001	Rolling Machine	1	6.875.000
92	6010101001	Monografi	2396	537.650.080
93	6010101999	Buku Lainnya	4	9.435.000
94	8010101001	Software Komputer	8	380.417.936
Total			3674	11.393.308.236

Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 4

No	Nomor Kendaraan	Tahun	Jenis/Merk	Keterangan
1	B 1885 SQQ	2020	Mitsubishi XPander 1,5L	Kendaraan Operasional
2	B 1107 SQP	2013	Toyota Veloz	Kendaraan Operasional
3	B 2797 KQ	2007	Isuzu Turbo Grand Touring	Kendaraan Operasional

Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2

No	Nomor Kendaraan	Tahun	Jenis/Merk	Keterangan
1	B 611 SQP	2008	Honda Supra X 125	Operasional Subbag Adum

Dalam hal pengelolaan BMN Tahun 2026, Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan BMN

Pengadaan laptop yang tercatat di aplikasi SAKTI melalui metode transfer online internal berupa laptop sebanyak 15 (lima belas) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 213.286.500

(dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang tertuang di Berita Acara Serah Terima Barang.

Penghapusan/Lelang BMN

Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menghentikan Aset dari penggunaan untuk Peralatan mesin sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) buah dengan nilai Rp. 3.796.868.238 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan) dan Aset Tetap lainnya sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) buah dengan nilai Rp. 221.784.950 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Gambar 3.X Laporan Perbandingan Penggunaan Sumber Daya Anggaran dengan Capaian Kinerja

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
465921 - KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL											
2042.BAH.060 Penguatan Pengelolaan Layanan Publik		layan	8	0	498.510.000	37.185.000	7.46%				
1	051 Penilaian Kepatuhan Interaksi Layanan Publik	Dokumen	3	0	150.000.000	0		Perencanaan	5.00%	Penilaian Kepatuhan Interaksi Layanan Publik akan dilaksanakan pada triwulan II	! Belum
2	052 Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Kesehatan	Dokumen	3	3	37.500.000	37.185.000	99.16%	Pelaksanaan	55.00%	Pelaksanaan Kegiatan Alih Media Perpustakaan telah terlaksana, namun Pengelolaan Perpustakaan Offline dan Online masih akan dilaksanakan hingga akhir tahun	✓ Sudah
	053 Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Kegiatan	2	0	311.010.000	0		Perencanaan	5.00%	Kegiatan Monev Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik belum terlaksana dan Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat masih akan berlangsung hingga akhir tahun	! Belum
2042.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	24	0	1.902.084.000	1.898.134.803	99.79%				
4	051 Koordinasi pendampingan dan peliputan dalam rangka pengawasan pembangunan Kesehatan serta LP/LS	Dokumen	9	0	380.821.000	380.476.343	99.91%	Perencanaan	1.00%	Terdapat perubahan RO dari 958 ke Z02 sehingga seluruh target dan volume dipindahkan	! Belum
5	052 Strategi Komunikasi Kesehatan dan Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan	Dokumen	5	0	399.095.000	399.094.300	100.00%	Perencanaan	5.00%	Terdapat perubahan RO dari 958 ke Z02 sehingga seluruh target dan volume dipindahkan	! Belum
6	053 Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (TV/Radio)	Dokumen	8	2	1.122.168.000	1.118.564.160	99.68%	Pelaksanaan	25.00%	Terdapat perubahan RO dari 958 ke Z02 sehingga seluruh target dan volume dipindahkan	✓ Sudah
2042.EBA.202 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Tingkat K/L		Layanan	22	0	7.141.935.000	916.746.671	12.84%				

No	Nomenklatur	Target			Anggaran			Pelaksanaan			Status Kemanfaatan
		Satuan	Volume	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Status	Progres	Keterangan	
7	051 Koordinasi pendampingan dan peliputan dalam rangka pengawasan pembangunan Kesehatan serta LP/LS		3	0	575.696.000	10.653.500	1.85%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal stakeholders eksternal	! Belum
8	052 Strategi Komunikasi Kesehatan dan Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan		9	1	3.211.279.000	0		Pelaksanaan	11.00%	Banyak kegiatan yang bersifat rutin dan diselesaikan di triwulan III	✓ Sudah
9	053 Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (TV/Radio)		8	0	2.646.260.000	906.093.171	34.24%	Perencanaan	1.00%	Pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal stakeholders eksternal	! Belum
10	054 Survei Kepuasan Pengguna Layanan		2	0	708.700.000	0		Persiapan	10.00%	Dalam tahap pengadaan	! Belum

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, efisiensi penggunaan sumber daya anggaran belum dapat diukur secara optimal karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahapan perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan yang bersifat berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran. Pada beberapa kegiatan, anggaran telah direalisasikan untuk mendukung kebutuhan awal pelaksanaan, seperti proses pengadaan, penyusunan rencana kerja, kontrak kerja sama, koordinasi, dan persiapan teknis, sementara output kegiatan masih dalam proses penyelesaian sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hubungan antara realisasi anggaran dan capaian output belum sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat efisiensi secara objektif pada Semester I. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang bersifat layanan berkelanjutan (*ongoing service*) atau dilaksanakan secara rutin setiap hari hingga akhir Tahun 2026, seperti layanan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, pengelolaan media, dan publikasi komunikasi. Karakteristik kegiatan tersebut menyebabkan capaian volume dan manfaat baru dapat diukur secara komprehensif setelah seluruh rangkaian pelayanan selesai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, berdasarkan kebijakan penyesuaian struktur anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai efisiensi belanja pemerintah, sejak Mei 2026 sebagian Rincian Output (RO) pada 2042.EBA.958 dialihkan ke 2042.EBA.Z02. Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran yang belum direalisasikan pada tahapan perencanaan dan persiapan dipindahkan ke rincian output yang baru. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pada RO 2042.EBA.958 menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi, bahkan mencapai 100 persen, karena anggaran yang direalisasikan merupakan biaya pada tahap perencanaan dan persiapan, sedangkan capaian volume output utama dilanjutkan dan dicatat pada RO 2042.EBA.Z02. Dengan demikian, perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian volume pada Semester I belum sepenuhnya dapat menggambarkan tingkat efisiensi kinerja secara keseluruhan dan akan lebih representatif apabila dinilai pada akhir tahun anggaran.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menerapkan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembatasan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan riil kegiatan, penugasan personel berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi, serta pemanfaatan media daring dalam pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi, termasuk pada kegiatan survei, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun 2026 merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini mencerminkan komitmen Biro dalam mendukung agenda pembangunan kesehatan nasional, khususnya dalam tata kelola komunikasi publik, pelayanan informasi, dan integrasi sistem manajemen internal.

Hingga periode Semester I Tahun 2026, realisasi angka untuk Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) masih tercatat 0 (nol). Hal ini bukan mencerminkan keterlambatan pelaksanaan, melainkan metodologis karena survei kepuasan dan penilaian standar interaksi layanan sedang dalam tahap persiapan (penyusunan kuesioner) dan dijadwalkan selesai pada Triwulan III.

Seluruh rangkaian kegiatan pendukung, seperti media monitoring, agenda setting, manajemen hoaks, amplifikasi konten digital, hingga pengelolaan layanan informasi (Halo Kemenkes, PPID, dan ULT), telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Biro berhasil mempertahankan komitmen untuk tetap memberikan layanan informasi yang prima bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Implementasi MANHUB (Management Support Hub) sebagai pusat kendali digital untuk integrasi data SDM, keuangan, aset, dan kearsipan telah berjalan efektif. Inovasi ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi birokrasi, akurasi pengambilan keputusan, dan transparansi tata kelola internal Biro.

Biro telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan standar layanan melalui berbagai upaya pembinaan, penguatan kapasitas SDM (pustakawan dan humas), serta pelaksanaan survei kepatuhan, meskipun tantangan terkait komitmen UPT dalam implementasi standar interaksi pelayanan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

B. TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja di atas, rencana tindak lanjut Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan *platform* MANHUB sebagai pusat data administratif Biro untuk memastikan validitas data pendukung kinerja yang *real-time* dan akuntabel.

- b. Meningkatkan integrasi sistem antara dasbor Ecentrix, OMNIX, dan kanal SP4N-LAPOR! guna mempercepat waktu respons pengaduan serta meningkatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
- c. Melanjutkan pengembangan kompetensi staf melalui pelatihan spesifik di bidang manajemen data, analisis media, dan *crisis communication* untuk mendukung transformasi birokrasi
- d. Melakukan pendampingan intensif bagi UPT dalam memenuhi standar pelayanan komunikasi publik, guna mencapai target jumlah UPT dengan kualifikasi layanan "Baik"
- e. Melaksanakan reviu berkala atas capaian indikator kinerja utama sebagai langkah preventif terhadap kendala operasional yang mungkin timbul di semester II.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode pelaporan. Meskipun terdapat sejumlah tantangan dan pemblokiran anggaran pada beberapa kegiatan strategis, Biro tetap berkomitmen untuk menjaga kinerja dan kualitas layanan melalui langkahlangkah adaptif dan kolaboratif. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan pada semester berikutnya guna mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan secara lebih optimal dan akuntabel.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Muhawarman
Jabatan : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,



Aji Muhawarman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
I	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6	Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	
	024.WA. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes*	86 Nilai
		IKM 33.1	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal**	
		IKM 33.2	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal**	
	2042. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Publikasi Komunikasi dan Informasi Publik	IKK 33.1.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	82 Nilai
		IKK 33.1.15	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	70 UPT
		IKM 33.1.1	Indeks Kepuasan Pemustaka	82 Indeks
		IKM 33.1.2	Indeks Opini Publik terhadap Diseminasi Informasi Program dan Kebijakan Kementerian Kesehatan	87,5 Indeks

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKM 33.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	85 Indeks
		IKM 33.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Kehumasan dan Kemitraan	100%
		IKM 33.1.5 Nilai SAKIP Unit Kerja	96%
		IKM 33.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Unit Kerja	83 Nilai
		IKD 33.1.1 Persentase Penanganan Komunikasi Krisis	75%
		IKD 33.1.2 Persentase Perencanaan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan di Kemenkes pada setiap Jenjang selesai pada triwulan I Tahun 2026	100%

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory (di Luar Renstra dan termasuk Ruang Lingkup Tusi)

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Anggaran

Rp11.150.000.000

Pihak Kedua,

**Kunta Wibawa Dasa Nugraha**

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama,

**Aji Muhawarman**